



70th
Anniversary of
Thailand - Indonesia
Diplomatic Relations
1950 - 2020

Selayang Pandang
Hubungan Bilateral
Indonesia & Thailand

Edisi Januari 2020
Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok



600-602 Petchburi Road, Ratchatewi,
Bangkok 10400
Thailand



KATA PENGANTAR DUTA BESAR

Selamat Datang di Bangkok, Sawatdee Khrab..... !



Buku berjudul Selayang Pandang Indonesia – Thailand ini disusun untuk memberikan gambaran singkat kepada pembaca, khususnya warga Indonesia yang ingin mengenal lebih dekat Thailand.

Pada bagian awal buku ini terpapar sejarah dari negeri yang menjadi pusat peradaban Asia Tenggara dan utamanya wilayah Indo-Cina. Keagungan sejarah dan keindahan alam Thailand menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk mengenal negeri Gajah Putih ini lebih dekat. Setiap tahun, jutaan turis asing mengunjungi negeri ini. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara hampir mencapai 40 juta orang dari jumlah penduduk sebanyak 68 juta, sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu sumber devisa utama bagi Thailand.

Indonesia dapat belajar banyak dari Kerajaan Thailand dalam mengelola peninggalan sejarah dan kawasan wisata secara professional dan modern. Thailand juga sangat menjamin keamanan, kenyamanan serta kebersihan dan kuliner yang sangat terjaga.

Buku ini juga memaparkan sistem politik dan pemerintahan Thailand, termasuk kultur dan kebiasaan warganya yang mayoritas beragama Buddha dan umumnya sangat patuh pada ajaran agamanya. Perekonomian Thailand yang maju pesat dengan potensi ekonomi, perdagangan, agrobisnis dan investasi yang mengesankan juga mewarnai buku ini.

Secara sekilas digambarkan kontak awal masyarakat Indonesia dengan Thailand yang memberi warna tersendiri, khususnya ajaran dan tradisi Islam di Thailand.

Hubungan kedua negara di berbagai bidang digambarkan selanjutnya untuk memantau berbagai kemajuan dan tantangan yang telah, sedang, dan akan di hadapi kedua negara. Sebagai negara bersahabat dan negara terbesar di ASEAN, Indonesia dan Thailand memiliki potensi besar tidak hanya bagi kemajuan kedua negara namun juga bagi kawasan dan global.

Selanjutnya, sebagai Perwakilan Resmi Indonesia di Bangkok, KBRI memiliki sejarah panjang dalam menjalankan mandat dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai bidang di negara akreditasi.

Tahun 2020 merupakan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Thailand. Sejumlah kegiatan baik yang bersifat mandiri maupun bersama akan diselenggarakan sepanjang tahun 2020.

Kami berharap melalui buku ini, publik dan birokrat, khususnya para pelajar, mahasiswa dan pengusaha Indonesia akan mendapat gambaran tentang peluang dan kerja sama yang dapat dilakukan dalam berbagai

bidang, khususnya industri otomotif, ekonomi kreatif, teknologi informasi dan pengelolaan pariwisata serta di bidang pendidikan, seni budaya dan olah raga.

Akhir kata atas nama Tim, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Kementerian Luar Negeri serta rakyat Indonesia yang telah memberi kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai pimpinan dan staf pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kerajaan Thailand. Semoga melalui buku ini, kami dapat menjalankan amanah untuk meningkatkan jalinan hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Thailand.

Bangkok, 25 Januari 2020

Duta Besar Republik Indonesia
untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP

AHMAD RUSDI

DAFTAR ISI

Pengantar	3
Fakta Singkat Thailand dan Indonesia.....	9
1. Sejarah dan Perkembangan Thailand	11
2. Sejarah Masuknya Orang Indonesia di Thailand.....	28
3. Perkembangan dan Potensi Hubungan Bilateral Indonesia dan Thailand.....	36
4. Sekilas tentang Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok	60
5. Lampiran.....	66
a. Kegiatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik	66
b. Keterangan Logo 70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia – Thailand	67
c. Susunan Kabinet PM Prayut Chan-o-cha	68
d. Percakapan Umum Bahasa Thai	69
e. Daftar Pejabat KBRI Bangkok.....	70

FAKTA SINGKAT THAILAND DAN INDONESIA

	 THAILAND	 INDONESIA
Nama Negara	Kerajaan Thailand (<i>Kingdom of Thailand</i>)	Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia</i>)
Ibukota	Bangkok	Jakarta
Bentuk Pemerintahan	Monarki Konstitusional	Republik
Kepala Negara	Raja Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua / Rama X (dinobatkan 4 Mei 2019)	Presiden Joko Widodo (sejak 20 Oktober 2014 dan dilantik kembali 20 Oktober 2019)
Kepala Pemerintahan	PM Prayut Chan-o-cha (sejak 5 Agustus 2014 dan terpilih kembali 5 Juni 2019)	
Bahasa Resmi	Thai	Bahasa Indonesia
Hari Nasional	5 Desember (<i>Hari Kelahiran Mending Raja Bhumibol Adulyadej, Ayahanda Raja Maha Vajiralongkorn, yang juga diperingati sebagai Hari Bapak</i>)	17 Agustus (Hari Kemerdekaan Republik Indonesia)
Luas Wilayah	513.120 km ²	1.904.569 km ²
Populasi	66,4 juta (2018, NSO)	265,015 juta (2018, BPS)
Jumlah Tenaga Kerja	37,4 juta (2019, MOL)	131,005.641 (2018, BPS)
Agama	Buddha 89%, Muslim 10%, Kristen 0,7%, lain-lain 0,3%	Muslim 87,2%, Protestan 7%, Katolik Roma 2,9%, Hindu 1,7%, lainnya 0,9% (termasuk Buddha dan Konghucu), lain-lain 0,4%
PDB Per Kapita	US\$ 7.760 (2019, NESDB)	US\$ 3.927 (2018, BPS)
Pertumbuhan Ekonomi	2,5% (2019, BOI), 4,2% (2018, NESDB)	5,04% (2019), 5,17% (2018) Bank Indonesia
Inflasi	0,8 - 1% (2019, BOI)	2,72% (2019, Bank Indonesia)
Cadangan Devisa	US\$ 221 milyar (2019, Bank of Thailand)	US\$ 129,2 milyar (2019, Bank Indonesia)
Foreign Direct Investment	US\$ 10,8 milyar (2018, Bank of Thailand)	US\$ 21,9 milyar (2018, UNCTAD)

Total Perdagangan Internasional	US\$ 501,72 milyar Ekspor US\$ 264,2 milyar, Impor US\$ 236,6 milyar (2019, MOC Thailand)	US\$ 309,27 milyar Ekspor US\$ 153,051 milyar, Impor US\$ 156,22 milyar (Jan-Nov 2019, Kemdag RI)
Industri Unggulan	Pariwisata, tekstil dan garmen, pemrosesan produk pertanian, minuman, tembakau, semen, manufaktur ringan (perhiasan, peralatan listrik, komputer dan komponennya, <i>integrated circuits</i> , mebel, plastik, mobil dan suku cadang, tungsten dan timah	Minyak kelapa sawit, batu bara, minyak bumi dan gas alam, tekstil, otomotif, peralatan listrik, pakaian, alas kaki, pertambangan, semen, instrumen dan peralatan medis, kerajinan tangan, pupuk kimia, kayu lapis, karet, makanan olahan, perhiasan, dan pariwisata
Komoditas Ekspor Utama	Mobil & motor, suku cadang otomotif, beras, tekstil dan alas kaki, produk perikanan, produk karet, produk kimia, perhiasan, komputer dan peralatan listrik	Minyak dan gas, lemak hewani dan nabati (termasuk minyak kelapa sawit), peralatan listrik, semen, karet, tekstil
Tujuan Ekspor Utama	ASEAN, AS, Tiongkok, Jepang, Hongkong, Australia, Malaysia, Vietnam, Bangkok, Indonesia	Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura
Komoditas Impor Utama	<i>Capital goods, intermedia goods</i> , bahan mentah, barang konsumsi, bahan bakar	Peralatan listrik, peralatan mekanik, besi dan baja, bahan makanan
Asal Impor Utama	ASEAN, Tiongkok, Jepang, AS, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Bangkok, Indonesia	Tiongkok, Singapura, Jepang, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Amerika Serikat
Free Trade Agreement	AFTA, ACFTA, Australia, Bahrain, Chile, Peru, Jepang, New Zeland, AS, India, Pakistan, BIMSTEC, EU FTA	AFTA, IJEP, ACFTA, IA-CEPA, AANZFTA, India, Pakistan, Korea

Sumber: National Statistic Office (NSO), Ministry of Labour (MOL), National Economic and Social Development Board (NESDB), Ministry of Commerce (MOC), Board of Investment (BOI), Bank of Thailand, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan United Nations Conference on Trade and Development.

1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN THAILAND



Chakri Throne Hall, Istana Grand Palace, Bangkok

Tidak ada yang dapat memastikan asal bangsa Thai. Dalam beberapa catatan sejarah Thailand disebutkan bahwa bangsa Thai datang dari wilayah Barat Daya Cina yang bermigrasi ke wilayah Thailand. Namun beberapa sejarawan menyebutkan bahwa bangsa Thai sudah ada di kawasan Asia Tenggara sejak lama dan bangsa dari Cina, Laos dan beberapa daerah lainnya justru bermigrasi ke wilayah Thailand. Bangsa Thai merupakan bangsa dari berbagai suku seperti Thai, Mon, Khmer dan beberapa kelompok etnis lain yang mempunyai kemiripan bahasa.

Pada abad ke-8 ajaran Buddha masuk. Ajaran Hindu yang dibawa bangsa Mon dan Buddha hidup secara damai. Sejak itu agama Buddha menjadi agama resmi Bangsa Mon dan Khmer.

Kerajaan Sukhotai

Sejarah Thailand modern dimulai pada abad ke-12 pada saat berdirinya Kerajaan Sukhothai pada tahun 1238 yang dianggap awal mula konsep monarki / kerajaan dalam sejarah Thailand. Tercatat ada 8 Raja yang memimpin Kerajaan Sukhothai (1238-1438). Kerajaan Sukhothai merupakan Kerajaan Thailand yang pertama. Di masa kerajaan ini berlaku sistem pemerintahan paternalistik dimana Raja mempunyai kekuasaan mutlak (absolut). Di masa pemerintahan Raja Ramkamhaeng, Raja ketiga kerajaan Sukhothai, mengalami jaman keemasan di bidang seni, budaya dan perdagangan yang antara lain ditandai dengan penciptaan huruf Thai yang pertama pada tahun 1283. Pada tahun 1437, Kerajaan Sukhothai menggabungkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Kerajaan Ayutthaya.

Kerajaan Ayutthaya

Kerajaan Ayutthaya berhasil memperluas kekuasaannya dengan menduduki Kerajaan Angkor. Kerajaan Ayutthaya (1350-1767) yang terbentuk dari 2 Dinasti yaitu Lawo-Ayutthaya dan Suphananphum terletak di lembah Chao Phraya (wilayah tengah) dan dikenal awal dari era diplomasi dan perdagangan internasional Thailand. Perkembangan sistem pemerintahan pada periode ini menganut sistem sentralisasi dengan melakukan pembagian yang jelas antara pemerintahan sipil dan militer. Pelabuhan Ayutthaya merupakan pusat perdagangan baru dari Asia Tengah, Asia Timur dan Melayu/Indonesia.

Pada tahun 1569, masa pemerintahan Raja Chakkaphat, Ayutthaya jatuh dan dikuasai Burma. Setelah 15 tahun, akhirnya Burma berhasil dipukul mundur dan dibangun kembali oleh Raja Naresuan (1590 – 1605). Pada masa Raja Narai (1656 – 1688) dianggap merupakan masa keemasan Ayutthaya. Di zaman ini hubungan perdagangan dengan Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris termasuk Tiongkok cukup pesat. Bahkan hubungan dekat dengan Perancis cukup akrab dalam rangka mengurangi pengaruh dari negara-negara Barat yang lain, seperti

Belanda. Sepeninggal Raja Narai, Kerajaan Ayyuthaya dilanda konflik internal sehingga terjadi perpecahan, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Burma untuk menyerang kembali. Ayutthaya jatuh di tangan Burma tahun 1767 pada masa pemerintahan Raja Ekkathat.

Kerajaan Thonburi dan Kerajaan Rattanakosin (Dinasti Chakri)

Kerajaan Thonburi (1767 - 1782) didirikan oleh Raja Taksin bertujuan untuk melawan kekuatan Burma yang menguasai Ayutthaya, dengan mendirikan kerajaan sementara di Thonburi. Kerajaan ini hancur 15 tahun kemudian, Raja Phra Putthayotfa Chulalok sebagai penerus kerajaan kemudian mendirikan Kerajaan Rattanakosin dan memindahkan dari Thonburi (Krung Thon) ke Bangkok (Krung Thep) pada tahun 1782 yang kemudian disebut juga periode Bangkok telah melahirkan Dinasti Chakri sampai sekarang (sudah mengalami pergantian 10 Raja). Pemerintahan Raja Phra Putthayotfa Chulalok yang selanjutnya disebut dengan gelar Raja Rama I berlangsung dari tahun 1782 sampai 1809.

Raja Rama II (Phra Phutthaloetla Naphalai) berkuasa dari tahun 1809 - 1824, kemudian dilanjutkan oleh Raja Rama III (1824 - 1851). Raja Rama III telah membawa Thailand ke masa kejayaan dan khususnya di sektor ekonomi. Pada masa Raja Rama IV (1851-1868), kebijakan politik luar negeri Thailand lebih terbuka terhadap negara-negara Barat Hal ini sebagai langkah untuk menghindari pertempuran atau penjajahan seperti di Burma oleh Inggris dan Indocina oleh Perancis.

Menurut catatan sejarah, beberapa negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Thailand pada masa Raja Rama IV dan Rama V (1868-1910) yaitu Portugal (sudah lebih dulu tahun 1516), kemudian Amerika Serikat (1833), Swedia dan Italia (1868), Spanyol (1870), Perancis (1882), Belgia (1883), Jepang (1887) dan Rusia (1898).



Raja Rama V (Raja Chulalongkorn)

dalam mempertahankan diri dari ancaman penindasan kolonial Barat maupun meletakkan satu landasan yang kuat bagi sistem pemerintahan modern. Raja Chulalongkorn berjuang menghapuskan perbudakan dan menata perekonomian.

Pada masa Raja Rama V atau Raja Chulalongkorn (1868 - 1910) telah dilakukan reorganisasi pemerintahan pusat, regional dan daerah yang membentuk satu dasar sistem politik yang dipakai sampai sekarang. Pada tahun 1892, Raja Rama V menerapkan pemerintahan "gaya Barat" dengan mengangkat 14 Menteri. Reformasi dalam pemerintahan dan cepatnya modernisasi negara telah membuahkan hasil, baik



*Raja Rama VII
(Raja Prajadhipok)*

Pada masa pemerintahan Raja Rama VI (1910 - 1925) banyak terjadi perubahan sosial untuk menciptakan sistem demokrasi dengan diperkenalkannya "Dusit Thani", yaitu pembentukan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Pada era ini, pendidikan merupakan keharusan bagi rakyat.

Raja Rama VII atau Raja Prajadhipok (1925 - 1935) menghadapi tantangan berat terutama resesi ekonomi dunia pada tahun 1930-an yang mengharapakan adanya pengetatan ekonomi. Raja Prajadhipok sangat diagungkan, namun keinginannya agar Thailand masuk dalam komunitas internasional sebagai negara yang "modern" dan

"liberal" mendapat tentangan dari keluarganya yang konservatif. Politik Thailand mengalami perubahan penting pada tahun 1932 melalui kudeta, yang berhasil merubah sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Ditandai dengan dirumuskannya konstitusi sementara "*Temporary Charter for the Administration of Siam Act*" sampai diterbitkan Konstitusi penuh. Pada tanggal 10 Desember 1932, Raja Prajadhipok menandatangani Konstitusi Pertama dan sekaligus mengakhiri 800 tahun kekuasaan kerajaan absolut di Thailand.

Raja Rama VII kemudian turun tahta digantikan oleh Raja Rama VIII atau Raja Ananda Mahidol. Pada saat itu, Raja Rama VIII sedang berada di Swiss menjalankan studinya. Akibatnya Kelompok Partai Rakyat lebih leluasa memainkan perannya di Thailand dengan militer sebagai peran utama dan Field Marshal P. Pibulsongkram sebagai pimpinan (kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri yang pertama di Thailand). Pemerintah dibentuk dengan keseimbangan antara militer dan sipil. Konsolidasi nasional dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh seperti General Phraya Phahal Phalphyuhaseni (militer) dan Dr. Pridi Banomyong (sipil).



Upacara Penobatan Raja Bhumibol Adulyadej (Rama IX)

Setelah Perang Dunia II, pada tahun 1945, Raja Rama VIII kembali ke Thailand dan pada waktu itu Dr. Pridi Banomyong bertindak sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1946, Raja Ananda Mahidol wafat tanpa ada sebab yang jelas dan sempat membuat situasi politik di Thailand kurang menentu.

Sepeninggalnya Raja Ananda Mahidol, pada 9 Juni 1946, Bhumibol Adulyadej yang pada waktu itu masih berusia 19 tahun dan

sedang menjalankan studinya di Swiss pulang ke Thailand untuk menggantikan kakaknya sebagai Raja Dinasti Chakri ke-9 (Rama IX). Pada tanggal 5 Mei 1950, secara resmi beliau dinobatkan sebagai Raja Thailand dan bertahta hingga wafat pada 13 Oktober 2016. Raja Rama IX (1950-2016) merupakan raja terlama memerintah Thailand dan sangat kharismatik. Raja Rama IX dikenal dekat dengan rakyat yang telah memprakarsai lebih dari 3000 proyek inovasi bidang pertanian, lingkungan, kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat Thailand. Diantara yang diperkenalkan Raja Rama IX



Raja Rama X dan Ratu Suthida

adalah konsep *"sufficiency economy philosophy"* yang menjadi acuan dalam rencana pembangunan nasional Thailand. Raja Bhumibol Adulyadej juga memprakarsai proyek pembuatan hujan buatan untuk membantu para petani terkena dampak kekeringan.

Sepeninggal Raja Bhumibol Adulyadej, Raja Maha Vajiralongkorn ditetapkan sebagai Raja Thailand pada 1 Desember 2016 (berlaku sejak 13 Oktober 2016). Pada 4 Mei 2019 dilaksanakan upacara resmi kerajaan untuk penobatan raja Raja Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Raja Rama X) yang berlangsung dari tanggal 4 Mei sampai 6 Mei 2019. Sebelumnya pada 1 Mei 2019 Raja Thailand menikah dengan Suthida Bajrasudhabimalalakshana dan mengumumkannya

sebagai permaisuri. Raja Rama X meneruskan inisiatif Raja Rama IX dan mengajak rakyatnya untuk menjalankan hidup sesuai petuah mendiang ayahnya, Raja Rama IX.

Kondisi Geografis dan Wilayah

Thailand memiliki areal seluas 513.120 kilometer persegi (lebih kurang seluas Pulau Sumatera), negara terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Indonesia dan Myanmar. Panjang perbatasan Thailand adalah 8.031 kilometer, meliputi 5.326 kilometer perbatasan darat dan 2.705 perbatasan laut / garis pantai (meliputi 1.840 kilometer garis pantai di sebelah Teluk Thailand dan 865 kilometer di sisi laut Andaman).



Di sebelah Utara, berbatasan dengan Myanmar dan Republik Demokrasi Rakyat Laos (kota paling Utara: Mae Sai di provinsi Chiang Rai). Di sebelah Selatan, berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand (kota paling Selatan: Betong, provinsi Yala). Di sebelah Timur, berbatasan dengan Republik Demokrasi Rakyat Laos dan Kamboja (wilayah paling Timur berada di Distrik Phibun Mangsahan, provinsi Ubon Ratchathani). Di sebelah Barat, berbatasan dengan Myanmar, Laut Andaman dan Selat Malaka (wilayah paling Barat terletak di Distrik Mae Sariang, provinsi Mae Hong Son).

Seluruh wilayah Thailand memiliki satu zona waktu yang sama dengan Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT+7).

Wilayah Thailand dibagi dalam 77 provinsi termasuk *Bangkok Metropolitan*. *Bangkok Metropolitan* memiliki pemerintahan daerah khusus dipimpin oleh gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara gubernur provinsi lainnya merupakan pejabat karir dari Kementerian Dalam Negeri. Dari 77 provinsi dibagi dalam 878 distrik, 7.255 sub distrik dan 75.032 desa.

Selain Bangkok Metropolitan dan Pattaya yang kepala daerahnya dipilih oleh rakyat, sistem desentralisasi pemerintahan daerah mengatur tentang lembaga pemerintahan daerah yang pejabat atau anggotanya dipilih oleh rakyat yaitu *Provincial Administration Organisation & Bangkok Metropolitan Council* (77), *Municipality* (2.442) dan *Sub-District Administration Organisation* (5.332).

Monarki dan Demokrasi di Thailand

Lembaga Kerajaan / Monarki di Thailand memiliki keunikan tersendiri yang seringkali sulit dipahami oleh kalangan luar. Lembaga kerajaan terus dihormati dan dinilai sebagai “unsur pemersatu dan pilar spiritual dan stabilitas Thailand”. Sejak 1932, Thailand menjadi negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Raja tidak terlibat dalam politik praktis namun menggunakan hak konstitusinya melalui lembaga legislatif (Parlemen), eksekutif (Perdana Menteri dan Kabinet) dan yudikatif (badan peradilan). Raja selalu berhati-hati menggunakan pengaruhnya dalam isu tertentu. Meskipun Lembaga Kerajaan ditempatkan di atas politik, seringkali dikaitkan dengan konflik politik domestik oleh tokoh-tokoh politik demi kepentingan politik tertentu.

Selama berlangsungnya sejarah modern, Thailand terus memantapkan lembaga-lembaga demokrasi untuk memastikan suara seluruh rakyat didengar dan dihormati. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok

masyarakat akar rumput dan organisasi-organisasi independen tampak lebih berperan aktif. Hal ini membawa kecenderungan Thailand menuju demokrasi peran serta (*participatory democracy*) mendorong semua lapisan masyarakat untuk lebih aktif melibatkan diri dalam pembentukan agenda nasional.

Demokrasi Thailand terus mengalami proses pasang surut. Sejumlah krisis politik telah terjadi yang dipicu dari perbedaan pandangan dan ideologi diantara kelompok masyarakat Thailand dalam mengawal keutuhan bangsa di abad ke-21.

Lèse-majesté law

Lèse-majesté law adalah bagian dari KUHP Thailand yang ditujukan untuk melindungi hak atau reputasi Raja, Ratu, keturunannya atau Wali Raja. Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk mengekang hak dan kebebasan berpendapat ataupun kebebasan akademik termasuk debat tentang monarki sebagai suatu lembaga. Pada 2005, Raja Bhumibol Adulyadej (Raja Rama IX) dalam pidato ulang tahunnya mengutarakan rasa tidak nyaman dan ketidaksetujuannya Undang-Undang tersebut dengan menyatakan "*the King can do no wrong*". Kendati demikian, Raja tidak dalam posisi untuk dapat merubah Undang-Undang tersebut yang merupakan kewenangan parlemen. Faktanya Undang-Undang tersebut telah dilihat sebagai cerminan masyarakat Thailand tidak mentolerir siapapun yang mengkritik Rajanya.

Sistim Hukum Kerajaan Thailand

Kerajaan Thailand mempunyai sistim hukum yang berdasar pada *civil law system*. Berawal dari abad ke-19, sistim hukum Thailand terbentuk dengan mengikuti model Hukum Perancis yang mengandalkan kodifikasi sebagaimana negara Eropa lainnya. Namun demikian dalam perkembangannya, sistim hukum tersebut juga dipengaruhi oleh tradisi *common law*, yang terlihat pada penggunaan putusan Mahkamah Agung yang berpengaruh kuat pada putusan-putusan pengadilan di bawahnya.

Kemajuan Ekonomi Thailand

Sejak pemerintahan Raja Chulalongkorn / Rama V (1868-1910), Thailand mengalami perkembangan yang cukup pesat sebagai hasil upaya modernisasi dan sikap pragmatis dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Ketika negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya berada di bawah kolonialisme negara-negara Eropa, Thailand menjalin hubungan yang cukup baik dengan negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat.

Keberhasilan dalam memacu modernisasi yang kemudian juga merubah sistem ekonomi telah mengakibatkan munculnya kelompok elit politik baru yang sebelumnya didominasi oleh keluarga Raja dan kalangan birokrat, yaitu kelompok intelektual dan kelompok militer. Dengan munculnya kedua kelompok politik baru ini babak baru sejarah modern Thailand dimulai. Babak baru ini ditandai dengan pecahnya kudeta 24 Juni 1932 oleh *People's Party* yang merubah sistem Kerajaan Absolut menjadi Kerajaan Konstitusional.

Dalam perjalanannya, kebijakan pembangunan pemerintah Thailand sangat menghargai nilai budaya masyarakat. Proyek pembangunan banyak melibatkan partisipasi masyarakat lokal yang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam mendukung pembangunan, khususnya wilayah pedesaan, Pemerintah Thailand memberikan pelatihan secara umum kepada tenaga kerja / masyarakat usia produktif Thailand untuk dapat bersaing dalam pasar bebas khususnya dalam rangka terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kesiapan Thailand ini ditunjukkan melalui kebijakan Pemerintah dalam menerapkan program yang dikenal dengan *One Tambon One Product* (OTOP) yang diadopsi dari kebijakan *One Village One Product* Jepang. OTOP pada dasarnya adalah suatu konsep atau program untuk menghasilkan satu jenis komoditas atau produk unggulan yang berada

dalam suatu kawasan tertentu. Kawasan ini meliputi suatu area wilayah dengan luasan tertentu seperti wilayah kecamatan/desa (tambon).

OTOP merupakan program stimulus *entrepreneurship* yang bertujuan untuk mendukung keunikan lokal dan mempromosikan produk dari setiap tambon (desa/kecamatan) di seluruh wilayah Thailand yang meliputi 77 provinsi, 8 distrik, 255 sub distrik, serta 787 desa. OTOP juga bertujuan untuk memperkuat ekonomi akar rumput Thailand dengan menghasilkan berbagai macam produk *handycrafts*, garmen, keramik, *fashion accessories*, peralatan rumah tangga dan makanan minuman, hingga produk *home decoratives*. Masing-masing wilayah Thailand memiliki kekhasannya masing-masing.

Pada awal abad ke-20 ditandai oleh munculnya kelompok-kelompok sosial baru. Kelompok militer, birokrat, masyarakat dan pedagang di perkotaan telah membentuk sistem politik ekonomi yang sama sekali baru, dan tetap memberi warna terhadap perkembangan selanjutnya, bahkan sampai saat ini.

Sebagai ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara dan negara pabrikan terbesar ke-19 dunia, Thailand secara konsisten memantapkan pertumbuhan ekonomi dan dukungan fundamental ekonomi yang kuat dan industri yang beragam sebagai faktor bagi ketahanan ekonomi dan membuat Thailand cepat pulih dari krisis keuangan global 2008.

Pembangunan ekonomi Thailand mengacu pada Rencana Strategi Nasional 20 Tahun (2017-2036) dengan visi mencapai ketahanan, kemakmuran dan keberlanjutan ekonomi dalam rangka menjadikan Thailand sebagai Negara Maju di tahun 2037. Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (2017-2021) telah disusun sejalan dengan Rencana Strategi Nasional. Prinsip "*sufficiency economy philosophy*" masih menjadi unsur vital dari Rencana Pembangunan ke-12, yang selama bertahun-tahun diterapkan sebagai pola untuk menciptakan perimbangan dan keberlanjutan pembangunan di Thailand.

Sebagai langkah maju dalam menciptakan kemakmuran ekonomi, Thailand menerapkan model ekonomi yang disebut “Thailand 4.0” yang bertujuan membuka Thailand terhadap berbagai tantangan ekonomi sekaligus membebaskan negara dari perangkap pendapatan menengah (*middle-income trap*). Model ekonomi ini memfokuskan pada 4 sasaran yaitu kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan lingkungan.

Penggerak ekonomi menuju kemakmuran ekonomi meliputi inovasi, teknologi dan kreatifitas antara lain dengan target menaikkan anggaran riset dan pengembangan hingga 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2021, menaikkan angka pertumbuhan ekonomi tahunan tidak kurang dari 5% dan mendorong pendapatan nasional per kapita dari US\$ 5.470 di tahun 2014 menjadi US\$ 15.000 di tahun 2032.

Model ekonomi Thailand 4.0 memastikan masyarakat Thailand akan maju bersama-sama dengan prinsip *no one left behind* guna terciptanya pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Thailand juga akan memastikan kekayaan alam dapat memproduksi potensi ekonomi secara berkelanjutan dengan menjamin ketersediaan udara dan air yang bersih dan ketahanan keberagaman hayati dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan manusia.



Model ekonomi Thailand 4.0 menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi melalui pemutakhiran 5 industri utama yaitu pertanian dan pangan, pariwisata, otomotif, industri listrik dan elektronik dan petrokimia yang bersinergi dengan pengembangan 6 industri baru bidang otomotifasi dan robotik, ruang angkasa, digital, bio-energi dan bio-kimia, obat-obatan serta perawatan kesehatan dan industri pertahanan.

Selain itu, Thailand tengah melangkah menuju tantangan baru mewujudkan ekonomi digital. Berbagai inisiatif telah diluncurkan pemerintah dalam mendukung produksi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), alat komunikasi dan sarana digital untuk sektor industri dan jasa keuangan termasuk target investasi untuk mewujudkan akses internet berkecepatan tinggi (*high-speed internet*) dalam mendukung industri masa depan, inovasi dan *e-commerce*.

Kehidupan Sosial – Budaya Thailand



Patung Buddha Tidur di Wat Pho, Phra Nakhorn, Bangkok

Thailand memiliki keberagaman budaya dan senantiasa melestarikan adat dan tradisi, seraya tetap menyerap beragam budaya dari luar sehingga memperkaya khasanah budaya Thailand. Kebudayaan Thailand dipengaruhi oleh ajaran agama terutama Buddha Theravada serta budaya India, Cina, Khmer dan tradisi lainnya dari semenanjung Asia Tenggara.

Dengan populasi sekitar 66.413.979 juta jiwa (data *Ministry of Interior*, 31 Desember 2018), sekitar 80% merupakan suku Thai, 10% suku Cina dan 3% suku Melayu. Selebihnya adalah suku-suku minoritas meliputi Mon, Khmer dan beberapa suku gunung (*hilltribe*).

Terdapat 5 agama utama yang diakui pemerintah. Sekitar 89% menganut agama Buddha dari sekte Theravada. Islam merupakan agama terbesar kedua dengan pemeluknya sekitar 10%. Agama Kristen utamanya Katholik sebanyak 0,7% dari populasi. Terdapat pula kelompok kecil masyarakat yang cukup berpengaruh yang menganut ajaran Sikh dan Hindu yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Kelompok penganut agama Kristen juga memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Thailand utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Semua kelompok masyarakat dapat hidup secara harmoni dan mendapat kebebasan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Thailand. Raja merupakan pelindung semua agama.

Pers dan Media di Thailand

Sektor media di Thailand berkembang dengan baik dan cukup maju khususnya media elektronik karena ditunjang oleh teknologi yang maju. Beberapa kalangan menggambarkan media Thailand bebas terkendali dimana Pemerintah memiliki otoritas pengawasan terhadap media terutama stasiun TV dan radio. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penyiaran radio dan telekomunikasi di Thailand dilakukan oleh Komisi Penyiaran Nasional dan Telekomunikasi. Sesuai *lese-majeste law*, Raja, Ratu, dan keturunannya atau Wali Raja

dilindungi hak dan reputasinya. Tidak seorangpun diperbolehkan mengkritik Raja Thailand, dan apabila dilanggar akan terkena hukuman penjara antara tiga sampai lima belas tahun.

Sistem Pendidikan di Thailand

Sistem pendidikan di Thailand memiliki kemiripan dengan Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar 5 (lima) tahun dimana tamatannya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia, sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, di Thailand tidak dikenal perguruan tinggi Politeknik seperti di Indonesia. Politeknik di Thailand berperan sebagai institusi '*longlife learning*' atau institusi yang memberikan sertifikat bagi keahlian tertentu, seperti mengelas, menjahit dan lain-lain. Thailand juga menerapkan wajib belajar 9 tahun. Pendidikan gratis diberikan sampai tamat sekolah menengah atas.

Penjaminan mutu di jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui ujian nasional. Akan tetapi, hasil ujian nasional di Thailand tidak memutuskan seorang siswa lulus atau tidak dari jenjang sekolah tersebut. Kelulusan siswa dari sekolah lebih ditentukan oleh ujian sekolah. Hasil ujian nasional hanya menunjukkan capaian akademik siswa dari seluruh propinsi, yang dijadikan sebagai acuan kebijakan perbaikan kualitas pendidikan.

Sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi dan terbuka sehingga calon mengetahui syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Ujian saringan penerimaan guru dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang dan potensial. Kualifikasi guru minimum harus memiliki gelar sarjana dengan lama

pendidikan 4 tahun. Pengembangan guru dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari pelatihan dan studi lanjut master bahkan sampai doktor.

Salah satu reformasi pendidikan di Thailand yang menarik adalah pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejak usia dini melalui program yang disebut *One Tablet Per Child* atau disingkat OTPC.

Peran Internasional Thailand



Gedung PBB (UNESCAP) di Rachadamnoen Nok Avenue, Bangkok

Markas Regional PBB dan Organisasi Internasional

Bangkok merupakan lokasi markas regional berbagai badan dan organisasi internasional, utamanya *United Nations Economic and Social Commission in Asia Pacific* (UNESCAP) dan perwakilan kawasan organisasi seperti *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNCHR), serta organisasi internasional dan LSM terkemuka lainnya.

UNESCAP memiliki mandat tematik seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *transnational crime*, perubahan iklim, hak asasi manusia, ekonomi kreatif, dan sebagainya. Didirikan pada tahun 1947, UNESCAP beranggotakan 53 negara dan 9 negara mitra. Sejak tahun 2019 hingga kini jabatan Sekretaris Eksekutif UNESCAP dipegang oleh Ibu Armida Salsiah Alisjahbana dari Indonesia.

Semenjak UNESCAP berkantor di Bangkok (1949) telah tiga pejabat Sekretariat Eksekutif UNESCAP dijabat oleh orang Indonesia yaitu J.B.P. Maramis (1973-1981), Adrianus Mooy (1995-2000), dan Armida Salsiah Alisjahbana (2019-sekarang).

Regional Support Office – Bali Process

Regional Support Office (RSO) Bali Process merupakan kantor untuk mendukung kegiatan Bali Process, yang menjadi prakarsa bersama Indonesia dan Australia di bidang penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. RSO berkantor di Bangkok dan dipimpin oleh *co-managers* yang terdiri dari wakil Indonesia dan Australia untuk penanganan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas di antara 42 negara anggota dan peninjau *Bali Process*.

2

SEJARAH MASUKNYA ORANG INDONESIA DI THAILAND



Mesjid Jawa di Kampung Jawa, Jalan Sathorn, Bangkok

Sejarah hubungan antara Indonesia dan Thailand dapat ditelusuri jauh sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit (sekitar abad ke-12). Peninggalan warisan sejarah kuno masih dijumpai di Thailand serta adanya kesamaan dan keterkaitan sejarah masa lalu dengan Indonesia membuktikan hubungan kedua negara yang kuat.

Semasa pemerintahan Raja Rama V, bangsa Siam mengenal Indonesia dengan sebutan Inao yang dipetik dari Cerita Panji Semirang dari Jawa. Cerita ini sampai sekarang masih diajarkan di sekolah-sekolah Thailand. Selain itu Thailand mengenal Indonesia dengan sebutan Sriwichai yang pengaruhnya sampai ke wilayah Selatan Thailand.

Kunjungan Raja-raja Siam ke tanah Jawa di era kolonial atau sebelum kemerdekaan Indonesia telah membawa pengaruh pada budaya Thailand antara lain pohon asam, tanaman eceng gondok (Paktop Jawa), burung perkutut (Nok Kao Jawa) yang dibawa Raja Rama V yang tiga kali ke Indonesia termasuk kesenian angklung yang dibawa Raja Rama VII tahun 1916. Begitu pula tanaman hingga buah-buahan dari mulai pohon karet sampai salak dibawa ke Thailand untuk dikembangkan. Penataan kota Bangkok pada jaman itu terinspirasi dari kota-kota yang dikunjungi Raja Rama V seperti Kebun Raya Bogor, Kota Bandung dan alun-alun Keraton.



Dekorasi lampu di Surakarta menyambut Kedatangan Raja Rama VII tahun 1929

Jauh sebelum itu konon dikabarkan bahwa Kesultanan Singora (Songkhla) (1605-1680) didirikan oleh Datuk Muzaffar/Dato Monggol yang mengungsi pasca terjadinya perpecahan di Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Singora menikmati masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Shah anak dari Datuk Muzaffar dan sempat memiliki wilayah kekuasaan di pantai timur di teluk Siam dan pantai Barat di laut Andaman, sebelum jatuh ke tangan Kerajaan Siam. Keturunan Sultan Sulaiman memiliki andil besar di awal pembentukan Kerajaan Rattanakosin hingga sekarang. Raja Rama III adalah anak Raja Rama II dari selirnya Putri Sri Sulalai anak Sultan Sulaiman Shah.

Keturunan Sultan Sulaiman Shah antara lain Jenderal Chavalit Yongchaiyudh sebagai Perdana Menteri Thailand ke-22 dan seorang mantan Panglima Angkatan Laut pertama Thailand.

Keberadaan masyarakat Indonesia di Thailand juga salah satu bukti kedekatan hubungan antara Indonesia dan Thailand. Jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya cukup banyak masyarakat Indonesia di Thailand termasuk keturunan-keturunannya yang sebagian besar sudah menjadi warga Thai. Di era modern sekarang Warga Negara Indonesia umumnya berasal dari kalangan profesional dan banyak pula Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Thailand dan berdomisili di Thailand.



Al-Quran tahun 1634 ditulis oleh Syekh Nuruddin Mohammad Roniri, ulama Kerajaan Pasai, tersimpan di Museum Sekolah Ahmadiyah Islamiyah, Narathiwat

Hubungan dan kontak antara masyarakat kedua negara juga dapat dibuktikan dengan peninggalan manuskrip kuno asal Indonesia yang disimpan di sebuah museum milik Sekolah Ahmadiyah Islamiyah atau Samanmitr Wittaya School di Narathiwat. Lebih dari 30% koleksi manuskrip di museum tersebut berasal dari Indonesia antara lain Al-Quran dan Kitab-kitab yang bertuliskan bahasa arab dan bahasa Jawa Kuno. Salah satu Al-Quran kuno asal Indonesia adalah yang ditulis

tahun 1634 oleh Syekh Nuruddin Moahammad Roniri seorang ulama Kerajaan Pasai.

Lebih jauh apabila ditelusuri lagi sebelum kemerdekaan Indonesia, asal usul masuknya orang Indonesia di Thailand, khususnya Bangkok, disebabkan beberapa faktor; antara lain masalah politik di jaman penjajahan Belanda di antaranya yang berasal dari Sumatera, hubungan ekonomi dan perdagangan, dan masalah sosial akibat kebijakan kolonial termasuk bencana alam. Golongan masyarakat selanjutnya adalah yang dibawa oleh Raja Thailand (Rama V) dan golongan Romusha dan Heiho yang dibawa oleh tentara pendudukan Jepang.

Sebagian besar golongan Romusha dan Heiho berasal dari Jawa dan Ambon dibawa ke Thailand untuk membantu Jepang menjajah wilayah Burma di antaranya dengan membangun jalur kereta api dari Bangkok menuju Burma. Jalur di Kanchanaburi yang dikenal dengan *the death railway* menjadi saksi jatuhnya korban jiwa sejumlah orang Indonesia dalam proyek tersebut.

Berdasarkan catatan, Endang Suriapi (asal Bandung), seorang mantan Heiho, terdapat lebih 100 orang mantan Romusha dan Heiho yang melarikan diri pasca kekalahan Jepang ke berbagai wilayah di Thailand karena tidak mau direkrut tentara Sekutu untuk menduduki kembali Indonesia.

Di awal pendirian KBRI di Bangkok, salah satu tugasnya adalah membantu pemulangan mereka secara sukarela ke Indonesia. Mereka yang tidak bersedia pulang sebagian sudah berkeluarga dengan orang Thailand dan beberapa dari mereka yang memiliki andil dalam pendirian KBRI dan menjadi staf Kedutaan. Masyarakat Indonesia dari golongan Romusha dan Heiho saat ini sudah tidak ada, tinggal keturunannya yang sudah berkebangsaan Thailand.

Sementara di wilayah Selatan Thailand yang mayoritas beragama Islam, kedekatan hubungannya sudah terjalin sejak kerajaan Melayu dan Aceh.

Di jaman dahulu, para pelaut dan saudagar dari Indonesia yang singgah untuk berdagang sebagian menetap di Thailand atau menetap sementara untuk menambah perbekalan dalam perjalanan menunaikan ibadah haji atau menimba ilmu agama. Tidak heran apabila di beberapa kota di Thailand khususnya Bangkok ditemukan nama-nama tempat yang sebenarnya berasal dari kata Indonesia seperti Makkasan (dari Makassar) dan Bayan (dari Bawean). Di daerah-daerah inilah para pelaut Bugis dan Bawean menetap. Beberapa orang Makassar dan Bawean kemudian diangkat menjadi pengawal raja karena terkenal berani.

Yang menarik adalah warga keturunan Jawa yang dibawa oleh Raja Siam, Raja Rama V, dimana pada saat pemerintahan beliau sebanyak 3 kali mengunjungi Jawa yakni tahun 1871, 1896 dan 1901. Pada saat kunjungan tersebut, beliau telah membawa sejumlah orang Jawa untuk mendampingi seorang insinyur Belanda, Allenbus. Orang-orang Jawa yang dibawa tersebut berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Mereka didatangkan di Bangkok untuk membantu pembangunan jalan dan pembuatan taman-taman istana di Bangkok. Sampai saat ini hasil kerja mereka masih dapat dinikmati sebagaimana terlihat adanya taman Lumphini, pohon-pohon asam yang ditanam di sepanjang jalan Rachadamnoen dan di sekitar lapangan Sanam Luang. Orang Jawa pada waktu itu dikenal sebagai bangsa yang jujur dan rajin bekerja terutama kepandaiannya dalam bercocok tanam (pertanian). Keadaan inilah yang sebetulnya menjadi salah satu dasar mengapa para pembesar Siam pada waktu itu memiliki kedekatan dengan bangsawan Surakarta dan Yogyakarta.

Kelompok masyarakat Jawa ini selanjutnya membentuk sebuah komunitas yang keturunannya menempati Kampung Jawa di Bangkok dengan keunikan masjid joglonya, yang berarsitektur Jawa. Konon, masjid Jawa didirikan di atas tanah Haji Mohammad Saleh yang diwakafkan pada tahun 1894. Sejak itu masyarakat Jawa di Bangkok secara swadaya dan bergotong royong mendirikan masjid.

Masjid ini telah 2 (dua) kali mengalami pemugaran yakni pada tahun 1927 dan tahun 1975 namun tidak merubah bentuk aslinya terutama pada bagian ruang depan. Keunikan masjid ini berbeda dengan masjid-masjid lain di Thailand yakni adanya bedug dan bentuk bangunan joglo mencirikan kekhasan Jawa. Di seberang Masjid terdapat pemakaman muslim yang sebagian besar orang-orang turunan Jawa atau Indonesia dimakamkan di pemakaman ini. Imam besar Masjid Jawa telah mengalami beberapa pergantian seiring perjalanan waktu dan tidak semuanya adalah keturunan Jawa dan telah bercampur dengan turunan Melayu, konon merupakan warga asli di wilayah tersebut.

Warga keturunan Jawa yang mengetahui silsilah kampung dan masjid ini sudah semakin sedikit yang saat ini sudah generasi ketiga/keempat dan rata-rata sudah berusia diatas 60-80 tahun. Namun demikian, warga masyarakat turunan Jawa berusaha untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang sudah diwariskan leluhurnya sebagaimana terlihat dari jenis makanan yang dijual di sekitar masjid seperti dadar gulung, lupis, sate dan utamanya dalam memakmurkan Masjid Jawa yang boleh dikatakan sebagai simbol pemersatu warga keturunan Jawa.

Selain Masjid Jawa, sejumlah masjid di Bangkok tercatat telah didirikan oleh orang Jawa seperti Masjid Bayan (didirikan tahun 1911), Masjid Darul Abidin (didirikan tahun 1945), Masjid Ban-U (didirikan tahun 1919), Masjid Harun (terdaftar 1947) dan Masjid Indonesia (terdaftar 1949). Letak masjid tersebut berada di bilangan Sathorn Road dan Bangrak dengan radius 2-4 kilometer, sebuah kawasan bisnis dimana terdapat hotel-hotel mewah yang berada di tepian Sungai Chao Phraya. Adapun berdasarkan penuturan orang Jawa di Bangkok tidak hanya tinggal di satu kawasan saja di daerah tersebut, namun juga menyebar ke daerah-daerah lain termasuk di tengah kota Bangkok.

Terkait hal tersebut, peran orang-orang Jawa dalam syiar Islam sekaligus membina hubungan dagang dengan Siam pada waktu itu tentunya merupakan keniscayaan. Meski tidak tercatat dalam prasasti, nampak peran orang Bugis dan orang Minangkabau dalam syiar Islam di

Thailand, misalnya masjid Makasan (dari kata Makasar) dan dakwah Islam yang dilakukan kelompok paderi. Salah satu pesantren berpengaruh di Satun, Thailand Selatan, bernama Darul Ma'arif didirikan oleh ulama Minangkabau dan berdiri sampai sekarang. Konon beberapa masjid di Bangkok juga mendapat pengaruh dari ulama Minangkabau seperti Mesjid Al-Atiq di Charoenkrung Road.

Berdasarkan data dari *Department of Provincial Administration*, Kementerian Dalam Negeri, per Januari 2020 terdaftar 4.000 masjid di seluruh Thailand yang tersebar di 72 provinsi. Jumlah masjid di Bangkok adalah 185 masjid. Sementara data dari sumber yang sama per 7 Maret 2018, terdaftar 3.943 masjid di seluruh Thailand di 71 provinsi dan di Bangkok terdapat 183 masjid. Jumlah masjid terbanyak di wilayah Thailand Selatan sebanyak 3.340 masjid.

Berkenaan dengan aktivitas keagamaan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, tampaknya umat Islam di Thailand terutama di Bangkok termasuk warga Kampung Jawa tidak menghadapi kendala apapun. Mereka mendapat kebebasan secara konstitusi untuk menjalankan ibadah tanpa tekanan apapun. Sikap solidaritas dan saling membantu juga terlihat dari kelompok agama lain dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat muslim di sekitar masjid.

Meningkatnya *people-to-people contact* antara kedua negara telah meningkatkan pula pertukaran budaya antara masyarakat kedua negara. Banyak umat Buddha Indonesia yang melanjutkan studi agama Buddha di Thailand. Begitu pula misionaris Kristen dari Indonesia juga banyak yang bertugas di Thailand dalam penyebaran agama Kristen terutama di wilayah perbatasan di Thailand Utara. Terlepas dari masalah agama, kemiripan sosial budaya antara Indonesia (Jawa) dan Thailand juga telah menjadi jembatan yang baik untuk mendekatkan hubungan kedua negara sebagai contoh sejumlah dongeng dan cerita wayang memiliki kemiripan seperti cerita Panji Semirang dan Ramayana serta banyak lagi. Hal ini kiranya dapat menjadi nuansa kedekatan sekaligus aset bagi

pemerintah Indonesia dalam mewujudkan diplomasi publik melalui *people-to-people contact* di masa-masa mendatang.



Duta Besar Ahmad Rusdi menjadi Inspektur Upacara Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 2019 di KBRI Bangkok dihadiri seluruh warga masyarakat Indonesia di Bangkok dan sekitarnya

Sementara itu, jumlah WNI berdasarkan data yang tercatat dalam sistem database KBRI melalui portal <https://peduliwni.kemlu.go.id> adalah per 31 Desember 2019 sebanyak 815 orang. Namun, jumlah tersebut belum mencerminkan jumlah sebenarnya WNI di Thailand, yang diperkirakan 3000 orang. Sebagian besar WNI yang menetap di Thailand adalah para pekerja profesional (termasuk para pegawai KBRI dan Konsulat RI), mahasiswa/pelajar, WNI menikah dengan WNA, dan peserta kursus yang lebih dari 6 bulan. Selain itu, terdapat WNI yang melakukan perjalanan wisata ke Thailand yang mempunyai kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

3

PERKEMBANGAN DAN POTENSI HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN THAILAND



Museum Nasional (Museum Gajah) di Jakarta yang memamerkan Patung Gajah hadiah dari Raja Thailand

Hubungan resmi antara Thailand dan Indonesia mulai terjalin sejak kedua negara membuka kantor perwakilannya di ibukota negara masing-masing 7 Maret 1950. Indonesia telah mengirimkan duta besarnya yang pertama ke Thailand pada tanggal 23 Februari 1952. Sejak itu, hubungan kedua negara tumbuh berkembang pada semua tingkatan dan semua bidang. Di usia 70 tahun hubungan diplomatik, kedua negara tidak hanya sekedar sahabat namun juga mitra dan teman pendiri ASEAN yang memiliki kesamaan kepentingan di fora regional dan internasional.

Kembali ke jaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Thailand telah menjadi basis perjuangan para pejuang Indonesia. Masyarakat Indonesia di perantauan ini mendirikan Kantor Perwakilan Indonesia pada tahun 1947.

Thailand juga memberikan dukungan yang positif terhadap kemerdekaan di Indonesia antara lain dengan kesediaan Pemerintah Thailand untuk memenuhi undangan peresmian pembentukan negara

Republik Indonesia Serikat / RIS (27 Desember 1947). Dukungan semacam inilah yang pada tahapan selanjutnya memperkuat hubungan kedua negara. Thailand juga membantu sebagai penengah dalam konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, dengan menjadi penyelenggara pertemuan penghentian konfrontasi itu pada bulan Juni 1966.

Indonesia dan Thailand tidak pernah memiliki konflik satu sama lain. Kedua belah pihak saling membantu di masa-masa sulit. Contohnya, Indonesia mengirim minyak ke Thailand ketika terjadi krisis minyak dunia di tahun 1970 dan memberikan dukungan keuangan kepada Thailand selama terjadi krisis keuangan Asia 1997. Pada waktu yang sama Thailand telah mengirimkan pasukan dalam operasi perdamaian di Timor Timur tahun 1999 dan berperan dalam pemantauan pelaksanaan proses damai di Aceh melalui *Aceh Monitoring Mission*.

Hubungan dekat Indonesia dan Thailand yang terjalin hingga sekarang juga berkat usaha dari pemerintah kedua negara untuk senantiasa memupuk ikatan kerja sama yang sudah terbina baik sejak dahulu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, Deklarasi Bandung 1955 dan Deklarasi Bangkok 1967. Ikatan kerja sama tersebut diperkuat dengan tingginya frekuensi pertukaran kunjungan antara pemimpin (kepala negara / pemerintahan) dan pejabat tinggi kedua negara yang berlangsung sampai sekarang. Di samping itu, kedua negara sejak awal penjalinan hubungan diplomatik sampai sekarang telah meningkatkan pertukaran misi kebudayaan sebagai sarana untuk membina saling pengertian dan memperkuat kerja sama antara rakyat kedua negara.

Upaya peningkatan hubungan dan kerja sama kedua negara dilakukan melalui mekanisme Komisi Bersama Indonesia – Thailand (*Joint Commission Meeting*) di tingkat Menteri Luar Negeri, yang dijadwalkan setiap dua tahun sekali secara bergiliran. Sidang Komisi Bersama ke-9 telah diselenggarakan di Yogyakarta pada 5-8 Juli 2018. Pada tahun 2020, Sidang Komisi Bersama ke-10 akan dituanrumahi Thailand sekaligus

untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand.

Selain dalam konteks bilateral, hubungan Indonesia dan Thailand juga terjalin erat di berbagai forum multilateral dan regional seperti PBB, ASEAN, maupun mekanisme lainnya. Kerja sama tersebut tidak hanya melalui dukungan dalam inisiatif kebijakan, namun juga saling dukung dalam pencalonan pada tingkatan negara maupun individu di organisasi internasional.

Pertukaran Kunjungan Tingkat Tinggi



Raja Rama V mengenakan dodot dibantu Susuhunan Surakarta. Raja Rama V membeli lebih dari 307 kain batik selama kunjungan ke tanah Jawa.

Tingginya frekuensi pertukaran kunjungan antara pemimpin (kepala negara / pemerintahan) dan pejabat tinggi kedua negara, berlangsung sampai sekarang. Kunjungan pemimpin Thailand ke Indonesia diawali dengan Raja Thailand yaitu Raja Chulalongkorn (Raja Rama V) sebanyak tiga kali yaitu ke tanah Jawa dan Bali (kunjungan pertama tanggal 28 Maret - 6 April 1871; kunjungan kedua tanggal 25 Mei - 28 Juli 1896); dan kunjungan ketiga tanggal 14 Mei - 13 Juli 1901). Pada kesempatan kunjungan Raja Rama V telah menyerahkan sebuah patung gajah dari perunggu sebagai cinderamata yang

sekarang ditempatkan di depan Museum Nasional Jakarta, oleh masyarakat umum biasa disebut Museum Gajah. Sebaliknya, Raja Rama V menerima 4 patung Buddha dari Candi Borobudur, saat ini disimpan di Gedung Phra Mondop, Grand Palace. Raja Rama V juga membawa 2 perangkat Gamelan Jawa (Pelog dan Slendro) saat ini disimpan di Museum Nasional dan *Department of Fine Arts*.



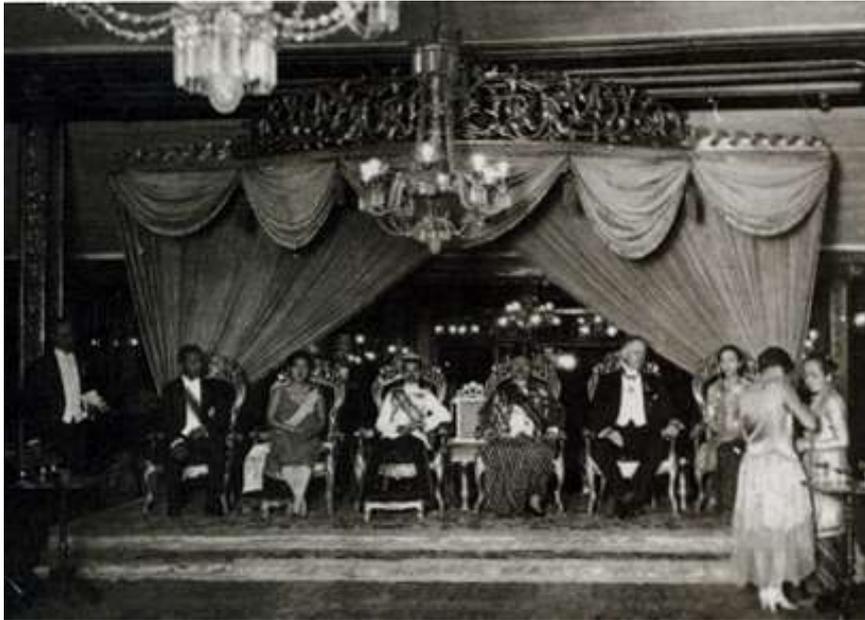
Raja Rama V bersama Sunan Pakubuwono X di Keraton Kesunanan Surakarta



Raja Rama VII dan Ratu mengunjungi Candi Borobudur (11 September 1929)

Raja Prajadhipok (Raja Rama VII) adalah Raja Thailand kedua yang mengunjungi Indonesia yaitu ke Jawa dan Bali pada 5 Agustus – 5 Oktober 1929, yang membawa alat musik “angklung” ke Thailand. Alat musik angklung sampai saat ini telah menjadi salah satu alat musik tradisional di Thailand. Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej (Raja Rama IX) dan Ratu Sirikit mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 8 – 16

Pebruari 1960. Raja Thailand sekarang, Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Raja Rama X) pernah berkunjung ke Indonesia ketika masih Putera Mahkota pada 1986.



Raja Rama VII dan Ratu bersama Susuhunan Surakarta Pakubuwono X



Kunjungan Raja Bhumibol Adulyadej (Rama IX) ke Indonesia pada era Presiden Sukarno





Raja Rama IX dan Ratu mengunjungi Candi Borobudur (1960)

Putri Maha Chakri Sirindhorn telah beberapa kali ke Indonesia (1985; 2012; 2013, 2016). Putri Maha Chakri Sirindhorn bersama UNESCO memprakarsai proyek pendidikan terkait *“improving the quality of life of children and youth”* untuk memberikan dukungan teknis dan keuangan bagi beberapa sekolah dasar di Bogor dan Ternate, Indonesia.

Putri Patchara Kittiyapa dalam kapasitas sebagai Duta Besar keliling *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* melakukan kunjungan ke Indonesia pada 2 April 2018.



Presiden RI Ke-2 Suharto dan Ibu Tien Suharto bersama Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit dalam rangka Kunjungan Kenegaraan ke Thailand

Untuk kunjungan tingkat kepala pemerintahan (Perdana Menteri), umumnya sudah menjadi tradisi bagi Perdana Menteri Thailand khususnya yang baru terpilih untuk mengunjungi negara tetangganya termasuk Indonesia. Perdana Menteri Thailand yang pernah mengunjungi Indonesia antara

lain Kriangsak Chomanan (17-24 Pebruari 1978), Prem Tinsulanonda (25-26 April 1980), Anand Panyarachun (1991), Chuan Leekpai (26-28 April 1993 yang dilanjutkan dengan menghadiri pertemuan APEC bulan Mei 1993 dan pada 1-2 Maret 1998), Banharn Silpa-Archa (24 – 25 April 1995) dan juga berkesempatan hadir dalam upacara pemakaman Ibu Tien Suharto pada 29 April 1995, dan Chavalit Yongchaiyudh (2-3 Januari 1997).

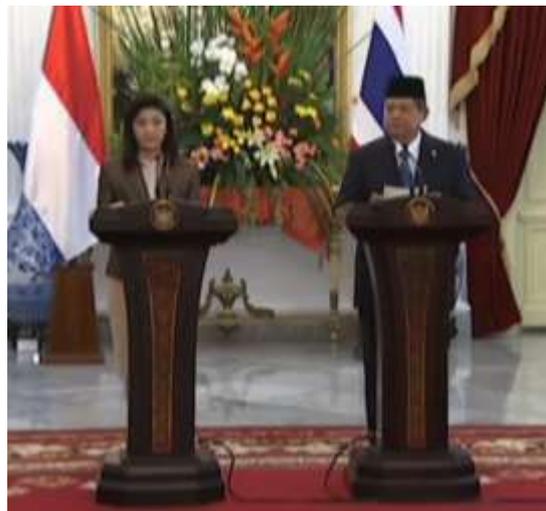


Kiri: Presiden RI Abdurrahman Wahid bertemu dengan PM Chuan Leekpai.
Kanan: Presiden Megawati Sukarno Putri bertemu dengan PM Thaksin Shinawatra



Kiri: Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Thaksin Shinawatra di Government House, Thailand. Kanan: PM Samak Sundaravej diterima Presiden Ke-6 di Istana Negara, Jakarta.

PM Thaksin Shinawatra tiga kali berkunjung ke Indonesia (17-18 Januari 2002 untuk kunjungan resmi; tanggal 8 Agustus 2002 ke Bali untuk menyaksikan penandatanganan MOU mengenai Karet antara Thailand-Indonesia-Malaysia; dan 6-8 Oktober 2003 untuk menghadiri KTT ke-9 ASEAN di Bali dan menyaksikan penandatanganan *Shareholder's Agreement* mengenai Karet antara Thailand-Indonesia-Malaysia. PM Surayudh Chulanont berkunjung ke Indonesia pada 21 Oktober 2006, Samak Sundaravej (26 Maret 2008), Abhisit Vejjajiva (20-21 Februari 2009; 2011 dalam rangka KTT ke-18 ASEAN), Yingluck Shinawatra (13 September 2011) dan Prayut Chan-o-cha berkunjung Indonesia dalam rangka *Asian-African Conference Summit* pada 21-23 April 2015.



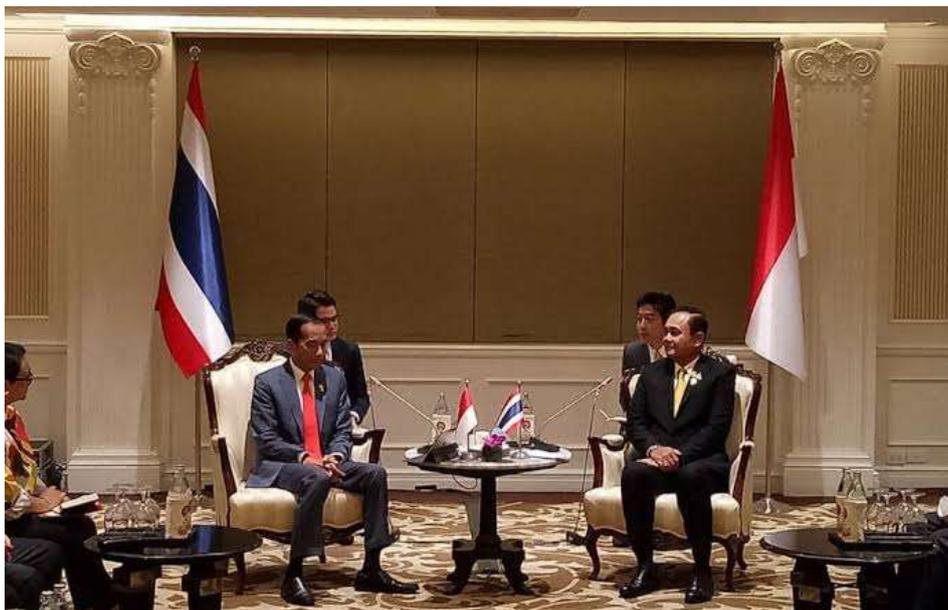
Kanan: Presiden RI Bambang Susilo Yudhono menerima kunjungan PM Jenderal Surayudh Chulonont di Jakarta. Jenderal Surayudh saat ini menjabat sebagai Ketua Penasehat Raja.

Kiri: Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melakukan Konferensi Pers bersama PM Yingluck Shinawatra di Istana Negara, Jakarta

Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Ir. Sukarno telah mengadakan kunjungan kerja ke Thailand selama beberapa kali antara lain pada tanggal 26-29 Januari 1958 dan tanggal 16-20 April 1961. Presiden RI kedua Soeharto juga telah beberapa kali mengunjungi Thailand yang pertama tanggal 19-22 Maret 1970, dan kemudian berturut-turut pada tanggal 4-5 Juli 1977, tanggal 25-26 Maret 1981, Desember 1995 dan Maret 1996. Presiden RI ketiga K.H. Abdurrahman Wahid adalah Presiden RI paling banyak mengunjungi Thailand sekalipun masa jabatannya hanya selama dua tahun (2000-2001).

Presiden RI kelima, Megawati Sukarnoputri sudah tiga kali mengunjungi Thailand yaitu bulan Agustus 2001, April 2003 dan Agustus 2003. Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono telah mengunjungi Thailand tanggal 15-17 Desember 2005 antara lain untuk menerima gelar Doktor Kehormatan dari Thammasat University dan tahun 2009 dalam rangka KTT ASEAN ke-14 dan ke-15. Presiden RI sekarang, Joko Widodo telah mengunjungi Thailand pada 2016 untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mendiang Raja Bhumibol Adulyadej (Raja Rama IX). Selanjutnya pada Juni 2019 dan November 2019, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bangkok dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-34 dan ke-35 dan Pertemuan terkait. Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri sebagai Utusan Khusus Presiden RI ke

Thailand mengunjungi Thailand dalam rangka menghadiri upacara kremasi jenazah mendiang Raja Rama IX, 26 Oktober 2017.



Pertemuan Bilateral Presiden RI Joko Widodo dan PM Thailand Jenderal Prayuth Chan-o-cha disela-sela KTT ASEAN Ke-34 di Bangkok

Kerja sama Pertahanan dan Keamanan



Pertemuan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Chief of Defence Forces Thailand General Pornpipat Benyasri disela-sela HLC ke-10 Tahun 2019 di Jakarta

Kerja sama pertahanan dan keamanan antara kedua negara berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kerja sama pertahanan dan keamanan yang mengikuti *trend* kekinian.

Dalam Bidang pertahanan terdapat beberapa kerja sama antara lain Forum Kerja Sama Pertahanan meliputi ASEAN Defence Ministry Meeting (ADMM), High Level Committee (HLC) Thainesia Meeting, Army to

Army Talk, Navy to Navy Talk, AFWG (Air Force Joint Working Group), INTELEX (Intelligence Exchange);Latihan Bersama (Latma), antara lain:

Latma TNI dengan RTARF – *Counter Terrorism Operation*, TNI AD dengan RTA – Latma “*Tiger*”, TNI AL dengan RTN – Latma “*Sea Garuda*”, TNI AU dengan RTF – Latma “*Elang Thainesia*”, Latma Multilateral “*Cobra Gold*” yang diikuti beberapa Perwakilan militer negara negara kawasan Asia Pasifik; program pertukaran pendidikan meliputi pendidikan, Lemhanas (NDC / *National Defence College*), *War College*, Sesko TNI (*Joint Staff College*), Sesko Angkatan (*Army, Navy, Air Force*), dan kursus perwira lanjutan; dan program pertukaran kunjungan pada tingkat Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staff Angkatan, Perwira, Siswa Sesko, dan Taruna Akademi TNI.

Kerja sama keamanan antara kedua negara telah berkembang pesat. Kedua belah pihak bekerja sama dalam penanganan isu-isu untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan seperti pertukaran intelijen, penanggulangan kejahatan lintas negara, penanganan radikalisme serta promosi Islam moderat dan dialog antar agama dan keyakinan.

Kerja Sama Bidang Hukum dan Perlindungan WNI

Kerja sama di bidang hukum yang dibina oleh kerajaan Thailand dan Indonesia, antara lain meliputi kerja sama teknis penegakan hukum oleh instansi terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN), kerja sama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun saling bantu dalam hal MLA (*Mutual Legal Assistance*) melalui *Central Authority* masing-masing negara serta penyampaian dokumen pengadilan melalui mekanisme *letter of rogatory* dengan perantaraan KBRI Bangkok.

Dalam catatan KBRI, beberapa masalah yang dialami oleh WNI yang berada di Thailand, baik yang menetap maupun yang sedang berwisata adalah permasalahan kehilangan dokumen perjalanan, overstayer, terlibat masalah hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, WNI yang sakit atau meninggal di Thailand, dan sebagainya.

KBRI memberikan bantuan pelayanan kepada WNI, baik pelayanan pendampingan dan penyelesaian kasus di lapangan dengan menyediakan nomor hotline (+66-92-903-1103), maupun melalui loket pelayanan di KBRI.

KBRI memfasilitasi pengajuan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI bermasalah kehilangan paspor dengan melaporkan ke KBRI dilengkapi bukti lapor dari polisi setempat. Dokumen SPLP dari KBRI selanjutnya dilaporkan kantor Imigrasi Thailand untuk mendapat pengesahan.

KBRI juga senantiasa memberikan imbauan kepada WNI di Thailand agar selalu menjaga sikap yang baik, menjaga dokumen, melakukan lapor diri, dan senantiasa menjaga komunikasi dengan KBRI. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi terpadu bagi WNI yang secara rutin dilakukan oleh KBRI.

Selain itu, bagi WNI yang sedang menghadapi masalah hukum maupun menjalani hukuman di Lapas, KBRI juga melakukan akses ke konsuleran untuk memberikan perlindungan dan konsultasi kepada mereka serta memastikan bahwa WNI telah mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hubungan Ekonomi dan Perdagangan

Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-8 bagi Thailand dan mitra dagang terbesar ke-3 di ASEAN. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, volume perdagangan RI-Thailand pada periode 2016-2018 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yakni US\$ 14,06 milyar (2016), US\$ 15,76 milyar (2017), dan US\$ 17,78 milyar (2018). perkembangan positif ini dapat kembali tercapai pada periode 2019 dimana pada periode Januari-November 2019, total perdagangan bilateral kedua negara telah mencapai USD 14,56 milyar (Sumber: Badan Pusat Statistik).

Nilai ekspor Indonesia ke Thailand memperlihatkan peningkatan yaitu sebesar US\$ 5,4 milyar (2016), US\$ 6,47 milyar (2017), US\$ 6,82 milyar (2018) dan US\$ 5,84 milyar (Januari-November 2019).

Produk Utama Ekspor Indonesia ke Thailand meliputi: produk mineral, minyak mentah, bijih besi, batu bara, mesin dan peralatan, produk kimia, suku cadang dan aksesoris kendaraan, mesin dan peralatan listrik, produk makanan laut, produk hasil pertanian, *pulp and paper* dan produk kertas.

Produk Utama Ekspor Thailand ke Indonesia meliputi: otomotif, suku cadang dan aksesoris, mesin dan peralatan, produk kimia, *polymers* and propylene, besi dan baja, produk tapioka, mesin dan suku cadang pengatur suhu, sepeda motor dan suku cadang dan aksesoris, produk metal dan baja, beras, tekstil dan pakaian, serta produk makanan, gula, dan buah-buahan.

Berdasarkan hasil *Joint Commission Meeting* (JCM) ke-9, kedua negara sepakat untuk mendorong penyelenggaraan pertemuan ke-1 *Joint Trade Commission* (JTC) RI-Thailand yang merupakan mandat dari *Trade Agreement* kedua negara yang ditandatangani pada 2011. Namun demikian, hingga tahun 2019 penyelenggaraan pertemuan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan oleh KBRI adalah memperkuat kegiatan promosi produk Indonesia baik melalui kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Thailand maupun oleh KBRI. KBRI memfasilitasi kegiatan *business matching* bagi pengusaha kedua negara untuk dapat menghasilkan transaksi yang saling menguntungkan.

KBRI juga secara aktif menjaring sebanyak-banyaknya pengusaha Thailand untuk mengikuti *Trade Expo Indonesia* (TEI) yakni 40 pengusaha (2016), 125 pengusaha (2017) dan 85 pengusaha (2018). Sementara itu pada TEI 2019, 60 pengusaha Thailand telah berpartisipasi.

Selama TEI 2018, telah dilakukan juga penandatanganan 6 (enam) MoU antara importir dan investor asal Thailand dengan Pengusaha Indonesia bernilai US\$. 246,163,200 yang terdiri dari investasi senilai US\$. 180.000.000 dan perdagangan senilai US\$ 66,163,200, atau total sekitar Rp. 3,6 triliun. Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri dan para Duta Besar RI yang meliputi produk jamu dan herbal, makanan olahan, produk perikanan dan investasi di sektor industrial estate. Penandatanganan keenam MoU menunjukkan produk unggulan Indonesia diminati oleh pasar Thailand dan Indonesia menjadi tujuan investasi yang menarik bagi Thailand.

Pada TEI 2018 dan 2019, Pemerintah Indonesia menyerahkan Primaduta Award kepada Perusahaan Thailand, untuk kategori Produk Industri/Manufaktur yang mewakili SCG Trading Co. LTD (2018) dan kategori Pasar Utama-Produk UMKM untuk Vara Food & Drink Co., Ltd (2019).

Tercatat juga perusahaan besar Thailand seperti SCG Trading Co., Ltd., BANPU Public Co., Ltd., Silver Sea Fishery Co., Ltd., Thai Union Manufacturing Co., Ltd., dan total sekitar 31 perusahaan Thailand lainnya telah menjadi importir utama produk Indonesia dengan nilai mencapai USD 2,22 milyar pada tahun 2018.

Kerja Sama Investasi

Nilai realisasi investasi Thailand di Indonesia pada 2017 tercatat US\$ 220,21 juta dengan 248 proyek. Realisasi investasi Thailand di Indonesia pada tahun 2018 meningkat secara signifikan, mencapai nilai US\$ 396,33 juta (187 proyek). Sementara itu, pada tahun 2019 realisasi investasi Thailand di Indonesia berjumlah USD 262,23 juta untuk 222 proyek.

Investor utama Thailand yang ada di Indonesia antara lain meliputi perusahaan SCG-semen, bahan bangunan, petrokimia dan industri terkait; BANPU-batu bara; Bangkok Bank-keuangan; Charoen Phokphand-pakan ternak ayam dan makanan olahan, PTT-minyak

mentah dan petrokimia, Indorama-petrokimia, Thai Summit Group/ Summit Autopart-suku cadang kendaraan; Ticon/Frasser-pergudangan, RATCH-pembangkit tenaga listrik, EGAT Internasional-batu bara; Mitr Phol-pabrik dan perkebunan gula, Sigma & Hearth-suku cadang, dan lainnya.

Sektor utama investasi lainnya Thailand di Indonesia meliputi industri mineral non-logam; tanaman pangan dan perkebunan; industri karet, barang dari karet, dan plastik; industri alat angkutan dan transportasi lainnya; energi; pergudangan dan jasa logistik; serta industri makanan.

Sementara itu, merujuk data *Board of Investment* (BoI) Thailand, nilai investasi Indonesia di Thailand pada 2019 adalah sebesar US\$ 286,72 juta (4 proyek) atau lebih besar jika dibanding dengan total investasi tahun 2018 yaitu US\$ USD 15,06 juta (3 proyek) dan tahun 2017 yaitu US\$ 256,08 juta (5 proyek).



Peluncuran Gojek di Thailand dengan sebutan GET dihadiri Bapak Rudiantara (Menteri Kominfo), Dr. Pansak Sriruchatapong (Deputi Menteri Digital Economy & Society) dan Bapak Ahmad Rusdi (Duta Besar RI untuk Thailand)



Duta Besar Ahmad Rusdi bersama
Pengelola GET dan GOJEK

Indonesia juga memiliki potensi untuk melakukan outbound investment di Thailand. Beberapa sektor dan perusahaan yang telah aktif melakukan investasi adalah Thai Lion Air (Lion Air), Pertamina Lubricants, Samudera Traffic Co., Ltd (Samudera Shipping Line Ltd), Inbisco (Mayora), serta

beberapa perusahaan industri kreatif seperti GOJEK (GET di Thailand) dan Traveloka.

KBRI Bangkok juga mencatat bahwa pada 22 Mei 2019, Perusahaan Indonesia, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui Medco Energi Global PTE Ltd. (Medco Global) menyatakan telah menyelesaikan akuisisi Ophir Energy plc, dengan nilai £408,4 juta atau sekitar Rp. 7,62 Triliun. Dengan akuisisi ini, aset Ophir yang berada di banyak negara, termasuk Thailand, menjadikan Medco sebagai pelaku usaha minyak dan gas regional yang terkemuka di Asia Tenggara. Hal ini ditindaklanjuti dengan berdirinya Medco Energi Thailand.

Dalam bidang investasi, pada 9 September 2019, Thailand mengumumkan paket promosi investasi yang baru dengan tujuan meningkatkan investasi asing di Thailand. Paket "*Thailand Plus*" akan menjadi pilihan bagi perusahaan yang ingin merelokasikan investasinya sebagai dampak dari *trade war*. Paket baru ini akan meliputi langkah-langkah komprehensif yang akan meningkatkan daya tarik Thailand sebagai tujuan investasi, termasuk percepatan insentif investasi dan kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan *the science, engineering, technology and mathematics* (STEM) *manpower*, deregulasi, dan perkembangan pelayanan sebelum dan sesudah investasi.

Daya tarik lainnya bagi investasi asing di Thailand adalah posisi Thailand dalam *global competitive index (indeks ease of doing business)* yang pada 2018 berada pada peringkat 26 dan 27 pada 2019. Thailand memiliki tugas besar untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan posisinya dimana pada 2017 Thailand menduduki peringkat 26 di dunia, yang merupakan peningkatan signifikan dari posisi 46 di tahun 2016.

JCM ke-9 menyepakati bahwa kedua negara akan mendorong peningkatan fasilitasi sektor swasta melalui penguatan peran asosiasi kamar dagang kedua negara termasuk *Indonesia-Thailand Chamber of Commerce (INTCC)* dan *Thailand-Indonesia Business Council (TIBC)*. Mekanisme ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan hubungan perekonomian kedua negara khususnya di bidang perdagangan, investasi yang berimbang dan berkelanjutan.

KBRI senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan Thailand yang berinvestasi di Indonesia maupun perusahaan yang potensial tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Business Forum dan audiensi secara rutin telah dilakukan KBRI untuk menjaga komunikasi dan hubungan dengan komunitas bisnis di Thailand. *Trade Expo Indonesia (TEI)* juga menjadi wadah untuk meningkatkan pengusaha Thailand melakukan investasi di Indonesia.

Kerja Sama Sektor Industri Strategis

KBRI juga mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor melalui penguatan kerja sama di sektor industri strategis. JCM ke-9 menghasilkan kesepakatan bahwa kedua pihak akan mendorong peningkatan kerja sama dalam sektor industri strategis di mana Indonesia menawarkan produk industri strategis di antaranya hasil produksi PT DI, PT INKA, PT PAL, dan PT PINDAD, serta perusahaan BUMN lainnya yakni PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Bukaka Teknik Utama (Bukaka).

Sejak 1978-2019, Thailand telah membeli 10 (sepuluh) Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) yakni 7 (tujuh) unit (NC212 dan NC212i) untuk keperluan pertanian (*Department of Royal Rainmaking*), dan 2 (dua) unit CN235-200, 1 (satu) unit CN235-200M (*Royal Thai Police*) untuk alat transportasi militer.



Serah terima pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia, NC 212i, di Pangkalan Udara Nakhon Sawan untuk proyek hujan buatan (11 Nov 2019)

Indonesia berharap Thailand akan terus meningkatkan kerja samanya di sektor industri strategis di antaranya dengan membeli pesawat buatan Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri Thailand, khususnya untuk mendukung upaya pembuatan hujan buatan.

Sejak tahun 1992, Thailand memiliki *Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation* di bawah *Ministry of Agriculture and Cooperatives Thailand*, yang memiliki tugas untuk membuat hujan buatan. Departemen ini merupakan capaian dari perjuangan Raja Rama IX yang sejak tahun 1955 menginisiasi Thailand *Royal Rainmaking Project* sebagai solusi untuk mengatasi masalah kekeringan yang dihadapi petani Thailand.



Penandatanganan kontrak antara PT Bukaka Teknik Utama dan M. Solution Co. Ltd (Thailand)

Sementara itu, PT Bukaka Teknik Utama telah menandatangani kontrak dengan perusahaan lokal Thailand, M-Solution Co., Ltd senilai USD 7,5 juta (sekitar 100 milyar rupiah) di Bangkok pada 22 Oktober 2019. Kontrak itu untuk pengadaan tiga puluh tiga (33) unit garbarata dan tiga (3) unit *walk way* termasuk pemeliharannya di Bandara Don Mueang, Bangkok.

Kerja Sama Bidang Ekonomi Kreatif



Penandatanganan MoU antara Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) dan Creative Economy Agency (CEA) Thailand

Indonesia dan Thailand telah menandatangani *MoU on Cooperation in the Field of Creative Economy* antara BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia) dan CEA (*Creative Economic Agency*) di Bangkok, tanggal 13 Mei 2019. MOU akan mendukung kerja sama di bidang industri kreatif dan menyusun rencana aksi kerja sama secara nyata termasuk untuk pemberdayaan UKM. Sebagai tindak lanjut, Indonesia mendorong Thailand

aktif terlibat dalam berbagai pameran. Program kerja sama yang ditawarkan Indonesia meliputi desain, fotografi, musik dan animasi.



*Foto Bersama Penandatanganan MoU
antara Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF)
dan Creative Economy Agency (CEA) Thailand*

Kerja Sama Bidang Karet Alam

Tiga negara utama penghasil karet alam dunia yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia sebagai negara anggota *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) menandatangani *MoU on Rubber Cooperation* pada tanggal 8 Agustus 2002 di Bali dan sepakat untuk mendirikan *International Rubber Consortium Limited* (IRCo). IRCo secara resmi tercatat sebagai perusahaan yang berkedudukan di Bangkok, Thailand pada 28 April 2004. Selain itu, IRCo berperan juga sebagai sekretariat ITRC. IRCo ditujukan untuk melakukan *strategic market operation*: operasi pasar dengan cara membeli, menjual dan mengatur kelebihan pasokan karet alam. Sampai saat ini operasi pasar belum pernah dilakukan.

Kerja Sama Teknis

Kerja sama teknis merupakan instrumen dalam peningkatan hubungan bilateral. Sejak 2011 Putri Maha Chakri Sirindhorn meluncurkan proyek kerja sama antara Thailand dan Indonesia untuk pengembangan remaja dan anak. Saat ini terdapat 8 sekolah dasar di Bogor dan Ternate yang tergabung dalam proyek ini. *Thailand International Cooperation Agency* (TICA) menawarkan program pelatihan tahunan (*Annual International Training Course*) bagi 50 negara termasuk Indonesia. Thailand dan Indonesia secara rutin melakukan Pertemuan Konsultasi untuk Kerja Sama Teknis sebagai mekanisme pertukaran kepakaran dan pengalaman kedua belah pihak.

Kerja Sama Budaya dan Pariwisata

Peningkatan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Thailand terwujud berkat peningkatan pertukaran budaya dan *people-to-people contact*. Sejumlah kegiatan kebudayaan telah diselenggarakan di antaranya penerjemahan buku cerita ke dalam bahasa Thailand seperti Sukreni Gadis Bali, pameran dan loka karya tentang batik, festival film dan kolaborasi pertunjukan budaya. Banyak umat Buddha Thailand berkunjung ke Candi Borobudur. Kedua pihak juga telah menggelar *Thailand-Indonesia Joint Ramayana Performance* di Candi Prambanan, Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2017. Pertunjukan ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan dalam kunjungan Menteri Kebudayaan Thailand, Mr. Vira Rojpojchanarat ke Indonesia pada tanggal 20-22 Juli 2017 dan sekaligus sebagai Pertunjukan Ramayana bersama yang pertama dilaksanakan oleh kedua negara.

Pemerintah Indonesia dan Thailand terus mendukung peningkatan frekuensi penerbangan antara kedua negara dalam rangka promosi pariwisata.



Duta Besar Ahmad Rusdi bersama Thanpuying Charungjit (Sekretaris Pribadi Ibu Suri Sirikit) dalam acara pembukaan Pameran Batik Koleksi Raja Rama V dan Loka Karya Batik (Putaran Ke-2) di Queen Sirikit Museum of Textiles, 23 Januari 2020

Dalam tiga kali kunjungannya ke Jawa, Raja Rama V mengumpulkan 307 potong kain batik antara lain dari Yogyakarta, Solo, Lasem, Garut, Cirebon, Banyumas, dan Tasik. Saat ini, koleksi tersebut tengah dipamerkan di *Queen Sirikit Museum of Textiles (QSMT)*, Bangkok sejak Oktober 2018-musim semi 2021.



Ibu Anita Rusdi menyambut kedatangan Putri Sirindhorn dalam Pembukaan Red Cross Bazaar ke-52 tahun 2019

Dalam upaya mempromosikan budaya, kuliner dan pariwisata Indonesia di Thailand, KBRI Bangkok aktif melaksanakan kegiatan promosi baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan dan pihak terkait lainnya. Kegiatan dilakukan antara lain dalam bentuk partisipasi di acara tahunan *Diplomatic Red Cross Bazaar*, *Young Women's Christian Association (YWCA) Diplomatic Charity Bazaar*, *Wonderful Indonesia Festival*, pagelaran budaya, dan *familiarization trips* ke destinasi wisata Indonesia. *Red Cross Bazaar* dan *YWCA Diplomatic Charity Bazaar* merupakan kegiatan *charity*, pendapatan diberikan untuk mendanai kegiatan sosial kemanusiaan antara lain melalui rumah sakit, panti jompo dan yayasan. Hingga tahun 2020, *Diplomatic Red Cross Bazaar* sudah dilaksanakan ke-53, diikuti oleh 56 kantor perwakilan diplomatik dan pengusaha terkemuka. Sementara *YWCA Diplomatic Charity Bazaar* sudah diselenggarakan sebanyak 66 kali. Dua kegiatan Bazaar tersebut diselenggarakan secara rutin setiap tahun.

Jumlah kunjungan wisatawan dari Thailand ke Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 adalah masing-masing 98.864 orang dan 138.235 orang, meningkat masing-masing 5,6% dan 39,8% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan setelah pada periode 2013 sampai dengan 2015 terus menerus mengalami penurunan. Namun demikian, pada tahun 2018 jumlah wisatawan Thailand ke Indonesia kembali mengalami penurunan sebesar 11,56% dari tahun 2017 menjadi hanya 122.252 orang.

Jumlah tahunan wisatawan Thailand ke Indonesia tersebut masih jauh lebih rendah dari jumlah wisatawan Indonesia ke Thailand yang pada tahun 2016, 2017 dan 2018 mencapai masing-masing 534.797, 576.110, 644.043 orang dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 11%.

Untuk tahun 2019, jumlah wisatawan dari Indonesia ke Thailand mencapai 709.613 orang, naik 10,07% dari periode yang sama tahun 2018. Sementara, jumlah wisatawan dari Thailand ke Indonesia pada periode Januari – Oktober 2019 tercatat 117.605 orang naik 9,43% dari periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 107.100 orang.

Kerja Sama Pendidikan

Kerja sama Pendidikan antara berbagai institusi Indonesia – Thailand dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan tahunan Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dan *Council of University President of Thailand*; MoU antara Perguruan Tinggi, SMA, SMK Indonesia dengan Perguruan Tinggi, SMA, SMA Vokasi Thailand; Pengajaran Bahasa Indonesia di Thailand dan *Thailand Corner* di Indonesia pada tahun 2018-2019; dan Beasiswa dari Pemerintah Indonesia (Darmasiswa, Beasiswa Negara Berkembang, Beasiswa Langsung dari Kementerian Agama untuk mahasiswa muslim Thailand dan Beasiswa dari Ormas Indonesia seperti Muhammadiyah) kepada warga Thailand. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2018/2019 jumlah penerima beasiswa Darmasiswa dan beasiswa Kemitraan Negara Berkembang ialah 307 orang.



*Pembekalan kepada 28 mahasiswa Thailand, penerima Beasiswa Darmasiswa
(13 Agustus 2019)*

Beasiswa dari Pemerintah Thailand melalui Perguruan Tinggi Thailand (*Chulalongkorn University, Mahidol University, Khon Khaen University, Prince of Songkla University, National Institute of Development Administration, Burapha University, Thammasat University, Asian Institute of Technology, Mae Fah Luang University, Partial Scholarship, Conference Scholarship, Research Scholarship, Graduate Scholarship dan His Majesty the King's scholarship and Queen Scholarship, dan ASEAN University Network*

(AUN) *scholarship*) kepada warga Indonesia. Jumlah penerima beasiswa di Perguruan Tinggi Thailand untuk warga Indonesia pada tahun 2018/2019 sejumlah 200 orang.

Selain itu, sebagian mahasiswa mendapatkan beasiswa dari Indonesia serta biaya mandiri. Jumlah mahasiswa Indonesia yang studi di Thailand kurang lebih 900 orang. Ada lima faktor yang menjadi alasan mahasiswa Indonesia kuliah di Thailand: kualitas pendidikan yang lebih bagus, pilihan beasiswa mudah diakses, kesamaan sosial ekonomi, kedekatan lokasi dan biaya hidup relatif murah.

Peringkat 8 perguruan tinggi terbaik Thailand di dunia tahun 2020: *Chulalongkorn University* (247), *Mahidol University* (314), *Chiang Mai University* (601-650), *Thammasat University* (601-650), *Kasertsart University* (801-1000), *Khon Kaen University* (801-1000), *King Mongkut's University of Technology Thonburi* (801-1000), dan *Prince of Songkhla University* (801-1000).



Kampus Chulalongkorn University di Phayathai Road, Bangkok

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Bangkok menekankan kepada seluruh mahasiswa Indonesia agar setelah menyelesaikan studi untuk kembali mengabdikan diri di tanah air.

4**SEKILAS TENTANG KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BANGKOK**

Wisma Indonesia (1982)



Gedung Utama KBRI Bangkok (1982)

Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok pertama kali didirikan pada tahun 1947 dengan nama Indonesian Office (INDOFF) yang waktu itu dipimpin oleh Izak Mahdi dengan stafnya antara lain Abdullah Kamil dan R. Tamtomo. Kantor INDOFF yang terletak di Pyapipat Lane, Jalan Silom, Bangkok, pada jaman revolusi dijadikan markas bagi kegiatan perjuangan kemerdekaan RI. Almarhum Adam Malik (mantan Wakil Presiden RI) bersama rekan pejuang lainnya pernah berkumpul dan menginap di gedung tersebut.

Dengan mengambil tempat di Gedung INDOFF, pada tanggal 27 Desember 1949, lebih kurang 1000 orang Indonesia yang berada di Thailand secara spontan menyambut hari Penyerahan

Kedaulatan Indonesia dari Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat. Pada tahun itu pula, status Perwakilan RI ditingkatkan menjadi Kedutaan. Dalam bulan Januari 1950, Kantor Kedutaan kemudian pindah ke Jalan Silom No. 349, sementara pada tahun sama Kuasa Usaha Izak Mahdi mendapat tugas untuk membuka Perwakilan Indonesia di Peking, Cina, sedangkan tugas di Bangkok dipercayakan kepada Kuasa Usaha a.i Malikuswari Muchtar Prabunegara sampai tahun 1952.



Foto di depan Indonesia Office, 1949



Gedung Utama Kantor KBRI Bangkok (Januari 2020)

Sejak Tahun 1952, Kantor Kedutaan Indonesia pindah ke tempat yang baru yaitu di 600 - 602 Petchburi Road, Bangkok (sampai sekarang). Pada tanggal 23 Februari 1952 Pemerintah Indonesia secara resmi menempatkan Duta Besar RI pertama di Bangkok. Gedung KBRI berikut rumah kediaman Kepala Perwakilan RI tersebut di atas tanah seluas 14 rai 36 wa (1 rai= 1600 m² dan 1 wa= 4 m²) setara dengan 22.544 m², pada bulan Februari 1952 dibeli oleh Pemerintah Indonesia dari Pangeran Chumpot Paribatra dengan harga 7 juta Baht (US\$ 350.000).

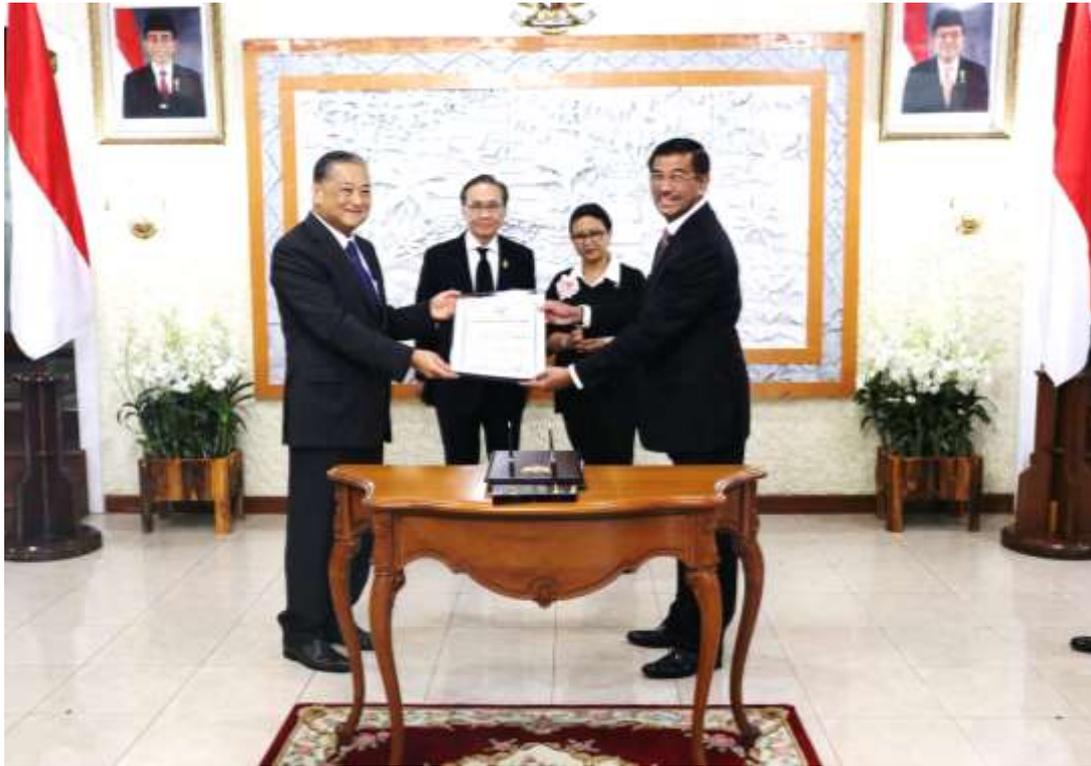


Gedung Wisma Duta yang berlokasi satu kompleks dengan kantor KBRI

Pada tanggal 1 Januari 1956 status perwakilan RI di Bangkok ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI yang didasarkan pada perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Thailand pada tanggal 2 Maret 1954. Naskah perjanjian ditandatangani oleh Menlu Thailand Pangeran Wan Waityakon (Krom Mom Naradhip Bosaparabandh) dan Duta

Besar Bandoro Pangeran Harjo Bintoro. Pada tanggal 9 Januari 1962, Duta Besar Isman meresmikan peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan sebagian kompleks KBRI dengan gedung baru kantor KBRI, yang pembangunannya selesai pada bulan September 1962. Selama berlangsungnya pembangunan gedung baru, Kantor KBRI untuk sementara menyewa sebuah gedung yang terletak di Jalan Phayathai no. 75 Bangkok. Gedung KBRI di Petchburi Road pada waktu itu merupakan satu-satunya gedung termodern jika dibandingkan dengan gedung-gedung kantor perwakilan asing lainnya yang berada di Bangkok.

Setelah melalui proses perundingan semenjak Duta Besar Ibrahim Yusuf, status kepemilikan tanah dan Gedung KBRI di 600-602 Petchburi Road memiliki kejelasan, ditandai dengan diserahkannya Sertifikat Tanah dari Mr. M.R. Sukhumband Paribatra yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Bangkok selaku Ketua Yayasan Chombhot-Pantip kepada Duta Besar Ahmad Rusdi disaksikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai bertempat di Wisma Duta KBRI Bangkok pada tanggal 13 Oktober 2016.



Serah Terima Sertifikat Tanah KBRI Bangkok dari Mr. M.R. Sukhumband Paribatra kepada Duta Besar Ahmad Rusdi disaksikan Menteri Luar Negeri Thailand dan Indonesia

Proses pengalihan hak milik atas tanah tersebut (No 1027) baru dapat terlaksana pada tanggal 11 Juli 2019 dari pengelola aset M.R. Jisnusson Svasti kepada Pemerintah RI. Proses didahului dengan penandatanganan dokumen dan pembayaran administrasi pengalihan sebesar Baht 60.700 (\pm US\$ 2.000) di Kantor Pertanahan Huay Kwang, Bangkok.

Dengan telah selesainya proses tersebut maka tanah dan bangunan KBRI yang berlokasi di Petchburi Road 600-602 telah resmi menjadi hak milik Pemerintah RI dan nama yang telah tertera di sertifikat atas tanah no. 1027 adalah Pemerintah RI, setelah pembelian tanah sejak tahun 1952.

Pengalihan Hak Milik ini akan menjamin kepastian hukum atas status kepemilikan tanah di tangan Pemerintah RI, mengingat banyaknya pihak yang berminat atas tanah ini karena letaknya yang sangat strategis di pusat perbelanjaan.



*Duta Besar dan Ibu Anita Rusdi berfoto bersama dengan pejabat dan staf KBRI Bangkok
(17 Agustus 2019)*

Dalam kompleks gedung KBRI selain terdapat ruangan kerja bagi tiap - tiap bidang atau fungsi dan Atase Teknis (Pertahanan, Perdagangan, Pendidikan & Kebudayaan, Kejaksaan Agung, Imigrasi, Polisi dan Riset), ruang rapat, ruang pertemuan, kamar kerja Kepala Perwakilan dan staf lainnya, juga terdapat Wisma Indonesia, yaitu tempat kediaman Kepala Perwakilan yang terletak di sebelah KBRI dilengkapi dengan sebuah gedung Guest House. Di samping itu, kompleks KBRI juga dilengkapi dengan gedung olah raga yang dapat digunakan untuk basket atau badminton, lapangan sepak bola mini, lapangan Tenis, kantin, masjid dan gedung Sekolah Indonesia Bangkok.

Sekolah Indonesia Bangkok didirikan tahun sejak 1962. Saat ini memiliki jumlah murid sebanyak 97 orang, yang duduk di bangku TK, SD, SMP dan SMA dengan Akreditasi A dan didukung oleh 15 guru dibawah seorang Kepala Sekolah yang saat ini masih dijabat sementara oleh Prof. Dr. Mustari (Atase Pendidikan dan Kebudayaan).

Konsulat RI Songkhla



Gedung Konsul RI Songkhla

Dalam rangka menjalankan misi diplomasi Indonesia di Thailand, selain memiliki Kedutaan Besar di Bangkok, Pemerintah Indonesia juga memiliki Konsulat RI di Songkhla (*Consulate of the Republic of Indonesia*), yang didirikan pada tahun 1997. Sesuai Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1995 tanggal 5 Juni 1995, KRI Songkhla dipimpin oleh Konsul dan memiliki

wilayah kerja yang meliputi 14 provinsi di kawasan Thailand Selatan, yaitu Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Yala, Ranong, Songkhla, Satun dan Surat Thani.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Perwakilan Republik Indonesia, KRI Songkhla menyelenggarakan fungsi kekonsuleran dan meningkatkan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia dan bantuan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Saat ini Kepala Perwakilan RI Songkhla dijabat oleh Konsul Fachri Sulaiman. KRI Songkhla beralamat di 19 Sadao Road, Bo Yang, Muang District, Songkhla 90000, Thailand (Tel. +66-(0)74-311544 Fax. +66-(0)74-312220 / 313905 Email: songkhla.kri@kemlu.go.id).

5

LAMPIRAN

A. KEGIATAN 70 TAHUN HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-THAILAND TAHUN 2020

Tahun 2020 menandai peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia – Thailand. Sejumlah kegiatan baik yang bersifat mandiri dan bersama akan diselenggarakan sepanjang tahun 2020:

No.	NAMA KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU	KETERANGAN
1.	Logo Competition	Bangkok	17 Januari 2020	Pensosbud
2.	Batik Workshop	Bangkok	23 Januari 2020	Pensosbud
3.	Seminar CEA on Creative Economy	Bangkok	8 Februari 2020	Ekonomi
4.	Dialogue dengan LSM HAM	Bangkok	18 Februari 2020	Politik
	Business Forum dengan Pemprov Sulawesi Selatan	Bangkok	Antara 22-24 Februari 2020	Ekonomi
5.	Seminar tentang Keimigrasian dan Kepabaenan Indonesia	Bangkok	Maret 2020	Atim dan Atjak
6.	Educational Trips	Jakarta Bandung	30 Maret – 4 April 2020	Pensosbud
7.	Seminar Hubungan Bilateral	Bangkok	April 2020	Politik
8.	Pameran dengan INTCC	Bangkok	Maret 2020	Atdag
9.	Indonesia Week	Bangkok	April/Juni 2020	Atdag
10.	<i>Side event</i> Sidang Komisi ESCAP	Bangkok	18 Mei 2020	Ekonomi
11.	Familiarization Trips	Indonesia	Juni 2020	Pensosbud
12.	Seminar di Payap University	Chiang Mai	Juni 2020	Politik
13.	Sales Mission Pariwisata	Bangkok	Juni 2020	Pensosbud
14.	Indonesian Festival (Thammasat University)	Bangkok	September 2020	Atdikbud dan Pensosbud
15.	Indonesian Film Festival	Bangkok	Semester II 2020	Atdikbud dan Pensosbud
16.	Resepsi Anniversary Hubungan Diplomatik	Bangkok	Semester II 2020	Panitia
17.	Joint Commission Meeting	Bangkok	Semester II 2020	Politik, Ekonomi
18.	5k-10k Fun Run	Bangkok	Semester I/II 2020	Atase Laut
19.	Indonesian Festival (Chulalongkorn University)	Bangkok	Semester II 2020	Atdikbud

B. KETERANGAN LOGO 70 TAHUN HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA - THAILAND



Brief Explanation about the Logo



LOGO CONCEPT



Logogram Logotype

THE MEANING OF LOGO



CIRCLE

Symbolizes integration, cooperation, and determination to keep moving forward together.



GARUDA

Symbolizes the identity of the Republic of Indonesia.



ELEPHANT

Symbolizes the identity of the Kingdom of Thailand.



NUMBER 70

Symbolizes the age of cooperation between Indonesia and Thailand, which lasts 70 years.



RUNNING MAN

Symbolizes the passion to always innovate and be creative in every works.



WAVES

Symbolizes confidence to face what future brings.

THE MEANING OF COLORS

Blue

MEANING :

Symbolizes professionalism, peace, and reliability.

Dark Red

Light Red

MEANING :

Symbolizes dynamism, courage, and independence.

Color gradation in the logo gives an elegant impression.

Overall color of the logo depicts the color of Indonesia and Thailand flags.

Typface (Font)

The type of font is **Montserrat**. This font gives a modern, innovative, and professional impression.

C. SUSUNAN KABINET PM PRAYUT CHAN-O-CHA (Disahkan Raja Rama X pada 10 Juli 2019)

Perdana Menteri	:	Jenderal Prayut Chan-o-cha (PPP)
Deputi Perdana Menteri	:	- Jenderal Prawit Wongsuwan (PPP) - Somkid Jatusripitak (PPP) - Mr. Wissanu Krea-ngam (PPP) - Jurin Laksanavisit (DP) - Anutin Charnvirakul (BJT)
Menteri pada Kantor Perdana Menteri	:	Mr. Tewan Liptapanlop (CPP)
Menteri Pertahanan	:	Jenderal Prayut Chan-o-cha (PPP)*
Deputi Menteri Pertahanan	:	Jenderal Chaichan Changmongkol (PPP)
Menteri Keuangan	:	Mr. Uttama Savanaya (PPP)
Deputi Menteri Keuangan	:	Mr. Santi Promphat (PPP)
Menteri Luar Negeri	:	Mr. Don Pramudwinai (PPP)
Menteri Pariwisata dan Olahraga	:	Mr. Pipat Ratchakitprakarn (BJT)
Menteri Pembangunan Sosial dan Jaminan Kemanusiaan	:	Mr. Juti Krairiksh (DP)
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Riset dan Inovasi	:	Mr. Suvit Maesince (PPP)
Menteri Pertanian dan Koperasi	:	Mr. Chalermchai Sri-on (DP)
Deputi Menteri Pertanian dan Koperasi	:	Mr. Thammanat Prompao (PPP) Ms. Mananya Thaiset (BJT) Mr. Prapat Photosuthorn (CTP)
Menteri Perhubungan	:	Mr. Saksayam Chidchob (BJT)
Deputi Menteri Perhubungan	:	Mr. Athirat Rattanaset (PPP) Mr. Thaworn Senneam (DP)
Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan	:	Mr. Varavut Silpa-Archa (CTP)
Menteri Digital Ekonomi dan Kemasyarakatan	:	Mr. Buddhipongse Punnakanta (PPP)
Menteri Energi	:	Mr. Sonthirat Sonthijirawong (PPP)
Menteri Perdagangan	:	Mr. Jurin Laksanavisit (DP)*
Deputi Menteri Perdagangan	:	Mr. Weerasak Wangsupakitkosol (BJT)
Menteri Dalam Negeri	:	Jenderal Anupong Paochinda (PPP)
Deputi Menteri Dalam Negeri	:	Mr. Nipon Boonyamanee (DP) Mr. Songsak Thongsri (BJT)
Menteri Kehakiman	:	Mr. Somsak Thepsuthin (PPP)
Menteri Tenaga Kerja	:	Mr. M.R. Chatumongkol Sonakul (ACT)
Menteri Kebudayaan	:	Mr. Itthiphol Khunplome (PPP)
Menteri Pendidikan	:	Mr. Nataphol Teepsuwan (PPP)
Deputi Menteri Pendidikan	:	Ms. Khunying Kalaya Sophonpanich (PPP) Ms. Kanokwan Vilawan (BJT)
Menteri Kesehatan	:	Mr. Anutin Charnvirakul (BJT)*
Deputi Menteri Kesehatan	:	Mr. Satit Pitutacha (DP)
Menteri Perindustrian	:	Mr. Suriya Jungreangkit (PPP)

Keterangan : * = rangkap jabatan | PPP=Phalang Pracharat | DP: Democrat Party | BJT: Bhujjaitai Party | CTP: Charththai Pattana Party | CPP: ChartPattana | ACT: Action Coalition for Thailand

D. PERCAKAPAN UMUM SEHARI-HARI BAHASA THAI

	ภาษาไทย
Hallo (pria)	sawatdi khrap
Hallo (wanita)	sawatdi kaa
Apa Khabar?	sabai di reu
Baik-baik saja	sabai di
Terima kasih	kop kun (khrap/kiha)
Ada apa?	Mi arai mai
Tidak apa-apa	mai pen rai / mai mi arai
Tidak bisa cakap Thai	phut Thai mai dai
Tidak mengerti	mai kaochai
Anda Mengerti?	kaochai mai
Kamar mandi dimana?	hong nam yu ti nai
Berapa harganya?	ni tao-rai
Apa ini ?	ni arai
Sangat mahal	peeng maag
Harganya bisa turun?	Lod dai mai?
Selamat Tinggal	la kon
Sampai jumpa	laew phobkan mai
Selamat bekerja	ko hai chok dii
Maaf	ko thod
Siapa nama anda?	Khun Ceu arai?
Nama <u>saya</u> Budi (pria)	<u>Phom</u> ceu Budi Krap
Nama <u>saya</u> Wati (wanita)	<u>Chan</u> ceu Wati kaa
Anda tinggal dimana?	Khun yu tii nai?
Anda sangat baik	Khun Chai dii
Jam berapa sekarang?	Ki Monk Khrap / Kha
..... ada dimana? yu ti nai khrap?
Anda tinggal dimana?	Ban khun yu tii nai khrap/kha?
Orang Itu siapa?	Khun nan pen khrai khrap?
Kamu siapa?	Khun pen khrai?

[pengucapankhrap (pengucap pria) dankha (pengucap wanita)]

E. DAFTAR PEJABAT KBRI BANGKOK

Embassy of the Republic of Indonesia 600-602 Petchburi Road, Ratchatewi, Bangkok 10400, Thailand Tel. +66-(0)2-2523135-40 Fax. +66-(0)2-2551267 E-mail: Bangkok.kbri@kemlu.go.id		
1.	Ahmad Rusdi	Duta Besar
2.	Dicky Komar	Wakil Kepala Perwakilan
3.	Lingga Setiawan	Minister Counsellor Ekonomi
4.	Abdullah Zulkifli	Minister Counsellor Politik
5.	Jani Mediawati Sasanti	Counsellor Protkons/HOC
6.	Nur Rokhmah Hidayah	Counsellor Pensosbud
7.	Aik Retno Utari	Sekretaris I Pensosbud
8.	Nurul Dewi Saraswati	Sekretaris I Ekonomi
9.	Desita Nuningharjanti	Sekretaris I Pensosbud
10.	Muhammad Nur Salim	Sekretaris I Protkons
11.	Fifi Afianita Firdaus	Sekretaris I Protkons
12.	Anet Adilla	Sekretaris II Ekonomi
13.	Dino Anggara	Sekretaris III Politik
14.	Yudi Tetra Mulya	Atase / Petkom
15.	Akhir Nuryani	Atase / Petkom
16.	Robertus Subono	Atase Pertahanan
17.	Heru Purwoko	Atase Laut
18.	Anang Surdwiyo	Atase Udara
19.	Flora Susan Nongsina	Atase Perdagangan
20.	Prof. Mustari	Atase Pendidikan & Kebudayaan
21.		Atase Polri
22.	Laksmi Indriyah R	Atase Kejaksaan
23.	Wahyu Eka Putra	Atase Imigrasi
24.	Masron Sinaga	Atase Riset
25.	Bambang Irawan	PBU Athan
26.	Irene Adhita Meylan	BPKRT I
27.	Amelia Jayatni	BPKRT II
28.	Prof. Mustari	(Plt) Kepala SIB



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BANGKOK**

600-602 Petchburi Road, Ratchatewi, Bangkok 10400, Thailand

☎ (66-2) 2523135-40 📠 (66-2) 2551267 ✉ bangkok.kbri@kemlu.go.id

🌐 kemlu.go.id/bangkok

📘 @KBRIBangkok

📷 @indonesian_embassy_bangkok

🐦 @KBRI_Bangkok